

**RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA
WISATA
(Studi di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Politik



Oleh :

**ANNISA NINDIANANTA
NIM. 1806016061**

**S1 ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Proposal Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Annisa Nindiananta

NIM : 1806016061

Jurusan. : Ilmu Politik

Judul : **“Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata : Studi di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang”**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi & Bidang Metodologi dan Penulisan



Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI
RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN DESA WISATA
(Studi di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang)
Disusun Oleh :
Annisa Nindiananta
1806016061


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 28 Desember 2022 dan dinyatakan
lulus.

Susunan Dewan Penguji

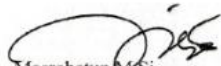


Penguji I

Sekretaris




Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si
NIP: 198409092019031007



Masrohatun M.Si
NIP: 198806212018012001

Pembimbing I



Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si
NIP: 198409092019031007

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nindiananta

NIM : 1806016061

Jurusan : S1 Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN DESA WISATA

(Studi di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan merupakan karya saya sendiri dan ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab. Skripsi ini asli dan belum pernah ditulis dan diterbitkan dimanapun dan oleh siapapun dengan bagian tertentu yang telah tertera rujukan sumber penulisannya.

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator,

Annisa Nindiananta

NIM. 1806016061

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji syukur tercurah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)**”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi selalu diiringi dukungan, bantuan, arahan, serta doa dari berbagai pihak yang menjadi bagian dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang besar mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum.
3. Drs. Nur Syamsudin, M.A., dan Muhammad Mahsun, M.A., selaku ketua dan sekertaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ahwan Fanani M.Ag. selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam pelaksanaan perkuliahan.

5. Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, nasehat, serta membimbing hingga terciptanya skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen pengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Segenap Civitas Akademik serta Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Hananto dan Ibu Indah. Saudara kandung Wirawan Sofyananta yang telah memberikan segala dukungan, motivasi, serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Segenap Kepala desa beserta perangkat desa serta masyarakat Desa Seloprojo.
10. Keluarga besar Suharto Somomartoyo yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bagus Maulino Wibowo yang telah memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis.
12. Sahabat seperjuangan sejak mahasiswa baru, Echa Nuriza Asri, Adib Fajar Maulana, Vido Adriansyah, yang selalu memberikan dorongan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta membantu dalam mendiskusikan berbagai permasalahan perkuliahan dan skripsi penulis.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Shofa Salsabila, Fakhmyra Rahayu, Widya Nawaksari, dan Fadya Rahma, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna dari segi bahasa, penulisan, isi maupun analisisnya. Maka dari itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan tersebut. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis,

Annisa Nindiananta

NIM. 1806016061

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur saya selaku penulis dari skripsi ini haturkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah dari Yang Maha Sempurna Allah SWT selama proses penyusunan skripsi. Sholawat serta salam juga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Dengan semua usaha, niat, doa, dan dukungan yang tak hentinya mengalir dari banyak pihak akhirnya skripsi ini mampu saya selesaikan dengan baik. Maka dengan tulus dari hati saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Diri saya sendiri
2. Kedua orang tua saya Bapak Hananto dan Ibu Indah
3. Almamater UIN Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu.

MOTTO

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas semua kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“... Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”

(Qs. An-Nisa ayat 29)

“Kamu terlalu muda untuk membiarkan dunia menghancurkanmu”

(THV)

ABSTRAK

Desa Seloprojo merupakan desa di dalam wilayah Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Desa Seloprojo memiliki pesona alam yang indah, keistimewaan Desa Seloprojo juga semakin terasa sebab hanya Desa Seloprojo yang memiliki pemandangan alam berupa air terjun. Selain itu, Desa Seloprojo juga memiliki kesenian khas sebagai bukti kebudayaan yang masih sangat terjaga dengan baik berupa tari Jatilan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Seloprojo yang secara nyata menunjukkan adanya resistensi kebijakan pembangunan desa wisata hingga terbagi menjadi dua kubu masyarakat yang berlawanan terkait pembentukan desa wisata yang berfokus pada wisata alam air terjun Sumuran Seloprojo. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta penelitian literatur sesuai dari segi produser pendukung dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan resistensi dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Seloprojo sebagai tanggapan kebijakan pengembangan desa wisata dalam RPJMDes Seloprojo sampai pada sekarang ini. Menurut James Scott, resistensi tersebut dilakukan untuk mempertahankan subsistensi masyarakat guna melakukan penolakan perubahan dengan ketetapan yang ada melalui banyaknya gerakan perlawanan. Resistensi masyarakat dilakukan dalam bentuk perlawanan terbuka dengan melakukan protes serta menolak mengikuti program kebijakan. Masyarakat juga melakukan resistensi dalam bentuk tertutup dengan menggossip dan bersikap acuh tak acuh. Tindakan resistensi berdampak terhadap kondisi pariwisata dimana wisata air terjun Sumuran menunjukkan gejala bangkitnya dengan pembangunan yang mencapai 55% dari target pembangunan pemerintah Desa Seloprojo.

Kata kunci: Kebijakan, Masyarakat, Pemerintah, Resistensi, Wisata Alam.

ABSTRACT

Seloprojo Village is a village in the Ngablak District, Magelang Regency. Seloprojo Village has a beautiful natural charm, the privileges of Seloprojo Village are also increasingly felt because Seloprojo Village has natural scenery in the form of a waterfall. Apart from that, Seloprojo Village also has a distinctive art as evidence of a culture that is still very well preserved, in the form of tan Jatilan

This research was conducted in the village of Seloprojo which clearly showed resistance to the policy of developing a tourism village so that it was divided into two opposite camps of society regarding the formation of a tourism village that focused on the natural tourism of the Sumairan Seloprojo waterfall. In this study the method used was qualitative research and the research used was field research using a case study approach. The author collected data through observation, interviews, and literature research according to the supporting producers in conducting the research.

The results of this study indicate that some of the Seloprojo Village community has resisted the development of a tourism village policy in the Seloprojo RPJMDes to date. According to James Scott, the resistance was carried out to maintain the subsistence of society in order to resist change with existing provisions through many resistance movements. Community resistance was carried out in the form of open resistance by protesting and refusing to participate in community policy programs as well as closed resistance by gossiping and being indifferent. The act of resistance had an impact on the condition of tourism where the Sumuran waterfall tour showed a rise in development which reached 55% of the development target of the Seloprojo Village government.

Keywords: Policy, Society, Government, Resistance, Nature Tourism.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Penelitian Terdahulu terkait Resistensi Kebijakan.....	7
2. Penelitian Terdahulu terkait Pengembangan Desa Wisata	14
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	20
2. Sumber dan Jenis Data.....	21

3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN TEORI.....	26
A. Kerangka Teori	26
1. Perlawanan Terbuka (<i>Public Transcript</i>)	28
2. Perlawanan Tertutup (<i>Hidden Transcript</i>)	29
BAB III GAMBARAN UMUM	32
A. Gambaran Umum Desa Seloprojo	32
1. Kondisi Demografi dan Monografi.....	32
2. Profil Pemerintah Desa Seloprojo.....	34
3. Sejarah Desa Seloprojo	34
4. Gambaran Sosial Ekonomi	35
5. Potensi dan Keunggulan	36
6. Gambaran Kebijakan Pariwisata Desa Seloprojo.....	37
BAB IV BENTUK-BENTUK RESISTENSI MASYARAKAT DESA SELOPROJO TERHADAP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA	41
A. Perlawanan Terbuka	43
a) Melakukan Protes	43
b) Menolak Mengikuti Program Kebijakan	47
B. Perlawanan Tertutup	49
a) Menggosip	50
b) Bersikap acuh tak acuh	52
BAB V ALASAN TERJADINYA RESISTENSI DALAM MASYARAKAT DESA SELOPROJO KABUPATEN MAGELANG	55
A. Faktor Penyebab Resistensi Masyarakat Desa Seloprojo Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata	57
a) Kekhawatiran Kesenian dan Kebudayaan Asli Desa Seloprojo Menghilang.....	58
b) Pembangunan Pariwisata Membutuhkan Dana yang Banyak.....	62

c) Doktrinasi Pengikut Kepala Desa Periode Sebelumnya	65
d) Sosialisasi yang Kurang Efektif	66
B. Tanggapan Pemerintah Desa Seloprojo terhadap Masyarakat yang Melakukan Resistensi	68
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Demografi Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang	33
Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.....	34
Gambar 5.2 Kegiatan Latihan Kesenian Desa Seloprojo.....	60
Gambar 5.3 Kawasan Wisata Air Terjun Sumuran, Desa Seloprojo	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2 Foto Kegiatan Observasi bersama Anggota Karang Taruna Desa Seloprojo	78
Lampiran 3 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Kepala Desa Seloprojo.....	78
Lampiran 4 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Masyarakat	79
Lampiran 5 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Pengelola Kawasan Wisata Air Terjun Sumuran	79
Lampiran 6 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Masyarakat Kontra Kebijakan	80
Lampiran 7 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Sekretaris Desa Seloprojo	80
Lampiran 8 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Salah Satu Warga Desa Seloprojo	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum, desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan dimana masyarakat bertempat tinggal, berkuasa, dan membentuk pemerintahannya sendiri. Desa juga didefinisikan sebagai kesatuan organisasi terendah dalam sistem pemerintahan yang memiliki batas daerah tertentu dibawah tingkatan sistem pemerintahan kecamatan, serta memiliki hak untuk menyelenggarakan maupun mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum (Ndraha, 1981). Desa juga berperan serta berkontribusi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana hal tersebut tergantung pada tata kelola sistem pemerintahan desa sebagai upaya menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hanif, 2011). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa menyatakan, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah, kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui sekaligus dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1).

Kabupaten Magelang memiliki sumber daya alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai daerah guna menikmati beragam objek wisata yang tersedia. Wisata Kabupaten Magelang diantaranya terletak di kawasan pegunungan yang memiliki pemandangan alam yang indah seperti objek wisata air terjun hingga kawasan hutan pinus. Objek wisata Kabupaten Magelang yang menjadi incaran para wisatawan salah satunya berada di Kecamatan Ngablak yang terkenal memiliki ragam objek wisata pemandangan alam, namun potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara maksimal (Raharjo, 2018). Hal tersebut menjadi peluang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Magelang, salah satunya yaitu Desa Seloprojo.

Desa Seloprojo merupakan desa di yang terletak di kaki Gunung Telomoyo dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Desa Seloprojo

memiliki pesona alam yang indah, keistimewaan Desa Seloprojo juga semakin terasa sebab hanya Desa Seloprojo yang memiliki pemandangan alam berupa air terjun. Selain itu, Desa Seloprojo juga memiliki kesenian khas sebagai bukti kebudayaan yang masih sangat terjaga dengan baik berupa tari Jatilan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 juga menyatakan bahwa Desa Seloprojo memiliki potensi sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pondasi pembentukan desa wisata yang bermanfaat dalam menciptakan peluang ekonomi sesuai potensi serta aksesibilitas kawasan pariwisata disertai pengembangan strategi wisata secara holistik mulai dari peningkatan pendapatan objek wisata dengan keterlibatan masyarakat hingga kemitraan unsur demi menjaga kelestarian alam (RPJMD Kabupaten Mgelang Tahun 2019-2024). Selanjutnya dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Desa Seloprojo tahun 2019-2025 menjelaskan bahwa dalam bidang pembangunan desa, Desa Seloprojo melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, serta melakukan pengembangan kegiatan pariwisata milik Desa Seloprojo (RPJMDes Desa Selorpojo Tahun 2019-2025).

Air terjun di Desa Seloprojo telah masuk RPJMD Kabupaten Magelang sejak tahun 1987 yang diresmikan secara langsung oleh Bupati Magelang sebagai destinasi wisata Kabupaten Magelang. Namun, objek wisata tersebut tidak mampu menarik banyak wisatawan, dimana hal tersebut disebabkan oleh belum tersedianya sarana prasarana yang memadai pada area wisata.

Pengelolaan yang kurang baik oleh kepala desa sebelumnya juga menjadi penyebab sepihnya minat wisatawan mengunjungi wisata air terjun tersebut, kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam mengelola wisata air terjun juga menjadi faktor pendukung tidak terurusnya wisata air terjun Desa Seloprojo tersebut. Maka dengan adanya peralihan kepemimpinan Kepala Desa Seloprojo saat ini juga menumbuhkan harapan guna mengembangkan wisata alam di Desa Seloprojo sekaligus menjadikannya desa wisata (Rizza Arge Winanta, 2021)

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Seloprojo, telah terjadi regenerasi kepemimpinan dimana pada pemerintahan kepala desa sebelumnya, prioritas pembangunan desa lebih banyak diarahkan menjadi desa wisata kesenian. Sementara itu,

pada periode kepemimpinan saat ini, pembangunan lebih diarahkan pada pembentukan desa wisata dengan fokus utama yaitu wisata alam Desa Seloprojo.

Namun, peralihan kebijakan pembangunan pada awal tahun 2019 tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian masyarakat Desa Seloprojo yang masih terfokus pada program kerja dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya. Alasan penolakan sebagian masyarakat Desa Seloprojo terkait kebijakan pembangunan desa yang baru adalah karena masyarakat Desa Seloprojo masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan warisan para leluhur sehingga sebagian masyarakat khawatir bahwa dengan peralihan kebijakan pembangunan desa maka kesenian khas Desa Seloprojo yang kental dengan unsur kebudayaan Jawa seperti tari Jatilan dan tradisi Saparan akan menghilang dan terlupakan.

Kebijakan pembangunan periode saat ini di Desa Seloprojo berfokus pada pembentukan desa wisata alam, dimana Kepala Desa Seloprojo menyadari bahwa wisata alam Desa Seloprojo merupakan aset yang jarang dimiliki oleh desa lain di wilayah Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ini. Desa Seloprojo memiliki wisata air terjun yang bernama air terjun Sumuran Seloprojo, maka kebijakan pembangunan desa wisata yang ditetapkan oleh Kepala Desa Seloprojo pun berfokus pada perbaikan aksesibilitas maupun fasilitas lain di wisata air terjun Sumuran Seloprojo dimana akses menuju objek wisata masih belum layak, yaitu jalan setapak yang mana ketika musim penghujan tiba, jalanan akan licin dan becek. Selain itu, fasilitas penerangan menuju air terjun Sumuran Seloprojo dan kebersihan objek wisata juga perlu mendapat perbaikan. Kebijakan pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk perbaikan jalan desa sebagai salah satu bentuk upaya menarik masyarakat agar bekerja sama dalam membangun desa wisata alam Seloprojo. Kepala Desa Seloprojo juga membangun fasilitas di area objek wisata air terjun Sumuran seperti gazebo dan toilet yang dapat digunakan oleh wisatawan yang berkunjung ke wisata air terjun Sumuran.

Perbedaan fokus orientasi pembangunan desa antara Kepala Desa Seloprojo saat ini dengan kepala desa periode sebelumnya menyisakan pertentangan pada masyarakat Desa Seloprojo dimana sebagian masyarakat mendukung kebijakan pembangunan desa saat ini yang berfokus pada pembentukan desa wisata alam, sementara sebagian masyarakat lainnya menginginkan Desa Seloprojo menjadi desa wisata yang

mengunggulkan keseniannya seperti fokus kebijakan pembangunan desa periode sebelumnya. Perbedaan harapan pada masyarakat Desa Seloprojo dalam prioritas pembentukan desa wisata akhirnya memicu terjadinya resistensi (perlawanan) dari masyarakat yang mendukung kebijakan pembangunan desa wisata periode sebelumnya. Maka dari itu, pemerintah Desa Seloprojo dituntut untuk lebih memberikan perhatian dalam mengambil alih daya tarik masyarakat agar mendukung kebijakan pembangunan desa wisata alam yang dicanangkan Kepala Desa Seloprojo saat ini.

Penolakan sebagian masyarakat Desa Seloprojo atas kebijakan pembangunan desa untuk mengembangkan potensi wisata alam di desa tersebut merupakan hasil dari tidak terjalannya kerja sama yang baik antara pemerintah desa periode saat ini dengan masyarakat. Resistensi terhadap kebijakan pembangunan desa wisata Seloprojo diperlihatkan secara jelas oleh sebagian masyarakat dalam bentuk rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata alam air terjun Sumuran Seloprojo, bahkan masyarakat mengadakan pertemuan dengan perangkat desa terkait penolakan pembangunan dan pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo tersebut. Reaksi penolakan sebagian masyarakat Desa Seloprojo menjadikan Desa Seloprojo terbagi menjadi dua kubu yang saling bertentangan dalam mendukung kebijakan pembangunan Desa Seloprojo. Fakta sosial tersebut menjadi konklusi atas resistensi yang ada pada masyarakat Desa Seloprojo.

Penelitian oleh Satriani (2018), Juhaepa (2018), dan Ambo Upe (2018) yang mengkaji desa wisata menyatakan bahwa, terjadinya resistensi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kultural dan ekonomi dimana budaya suatu daerah telah melekat dalam waktu yang lama di masyarakat sehingga berhubungan pula dengan spiritualitas masyarakat serta kehidupan masyarakat yang telah lama bergantung pada hasil alam daerahnya. Faktor lain yang mempengaruhi resistensi kebijakan yaitu faktor struktural dimana suatu perubahan dalam kelompok masyarakat pasti akan menimbulkan pro dan kontra, ada yang dapat diterima dengan mudah, ada pula yang harus menerima penolakan, ada yang melakukan perlawanan kebijakan, namun ada juga yang memutuskan melakukan asimilasi maupun adaptasi terkait suatu kebijakan tergantung pada tujuan kebijakan tersebut. Selanjutnya, yaitu faktor lingkungan dan sarana sosial, yang ditunjukkan masyarakat dengan sikap statis, tidak menerima perubahan, kurang inovasi,

tertutup, dan tidak adaptif baik dari segi fisik geografis, sosial, maupun budaya antar masyarakat.

Resistensi atas kebijakan juga dapat diperlihatkan contohnya seperti pada Suku Bajo, yaitu dengan melakukan demonstrasi dan sosialisasi guna menolak kebijakan pemerintah. Masyarakat juga melakukan perlawanan secara kontemporer sebab mendapatkan ancaman tidak akan lagi mendapatkan bantuan di Pulau Masudu sehingga bentuk perlawanan yang dilakukan adalah dengan kembali ke rumah masing-masing agar rumah tidak disegel oleh petugas karena rumah dalam kondisi kosong (Satriani, 2018).

Penelitian mengenai desa wisata telah banyak dilakukan dengan fokus penelitian mayoritas pada pelaksanaan pengembangan pariwisata serta koordinasi terkait pengembangan objek wisata suatu daerah saja, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang berfokus pada resistensi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan suatu daerah. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada Desa Seloprojo yang secara nyata menunjukkan adanya resistensi kebijakan pembangunan desa wisata hingga terbagi menjadi dua kubu masyarakat yang berlawanan terkait pembentukan desa wisata yang berfokus pada wisata alam air terjun Sumuran Seloprojo dan bertentangan dengan kebijakan pembangunan desa wisata sebelumnya yang berfokus pada kesenian khas Desa Seloprojo yaitu kesenian Jatilan dan tradisi Saparan. Signifikansi penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian mengenai resistensi kebijakan yang terfokus pada desa wisata mulai dari bentuk resistensi hingga alasan yang melatar belakangi penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Setiap daerah memiliki upayanya sendiri dalam mengembangkan potensi pariwisatanya, setiap kebijakan juga pasti menimbulkan pro dan kontra yang memicu masyarakat melakukan resistensi maupun penolakan kebijakan pemerintah setempat. Melalui penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk dan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata serta alasan masyarakat dalam menolak kebijakan pemerintah terkait pengembangan pariwisata di daerahnya, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti mengenai **“Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata : Studi di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang”** maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk resistensi pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi resistensi kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian mengenai **“Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata : Studi di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang”** maka akan menguraikan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk-bentuk resistensi pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui alasan melatarbelakangi adanya resistensi di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat yang akan dijabarkan ke dalam manfaat teoritis serta manfaat praktis sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk memahami resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan desa wisata, studi Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai wawasan dan pengetahuan tentang bentuk resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan desa wisata studi Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang relevan dimasa depan.
- b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan pemikiran mengenai resistensi serta dapat menambah dan memperkaya pengetahuan terhadap ilmu yang didapatkan diperkuliahan mengenai ilmu politik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dengan cara meringkas baik penelitian yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasikan untuk menghindari jika terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya sehingga akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu. Dengan melakukan penulisan penelitian terdahulu ini maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan (Hasnawati, 2020).

Guna memudahkan kajian terhadap penelitian sejenis yang sudah dilakukan maka peneliti membagi menjadi dua tema besar yang tema yang pertama yaitu terkait resistensi kebijakan serta tema yang kedua yaitu terkait pengembangan desa wisata.

1. Penelitian Terdahulu terkait Resistensi Kebijakan

Penelitian pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Karunia Putra Pamungkas (2016) dengan judul Resistensi Masyarakat Terhadap Pemerintahan Daerah Studi Kasus: Desa Wisata Sembungan, Kec Kejajar, Kab. Wonosobo (Pamungkas, 2016). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini ditulis dengan maksud memberikan penjelasan mengenai resistensi yang dilakukan oleh masyarakat desa sembungan dimana masyarakat ingin pembentukan pariwisata secara mandiri, namun ditengah tengah perjalannya terjadi otoritas pada pemerintahan daerah yang menjadi penghalang bagi masyarakat desa setempat. Permasalahan resistensi pada desa wisata sembungan ini mencakup beberapa hal yakni pada permasalahan ekonomi, dan sumber daya alam. Dimana masyarakat memiliki taerget pada sektor pariwisata yang mereka kelola dengan mengoptimalkan tenaga kerja para pemuda yang belum memiliki pekerjaan. Dengan kebijakan

pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat desa mengakibatkan enggan masyarakat untuk melakukan kerjasama.

Penelitian yang kedua yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Satria Anggun Kinanti, I wayan Suwena, dan I gusti Putu Sudiarna (2019) dengan judul resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan RISHA di Desa Bayan, Lombok, NTB (Sarita Anggun Kinanti, 2019). Didalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa salah satu desa yang mendapatkan bantuan teknologi RISHA adalah Desa Bayan. Teknologi RISHA ini merupakan rumah rehabilitasi pasca terjadinya gempa yang terjadi di wilayah lombok NTB, rumah dengan menggunakan konsep knock down atau dapat dikatakan tidak menggunakan bata dan semen sehingga hanya menggunakan beton dan baut saja sehingga pembangunan rumah tersebut dapat berjalan cepat program rumah teknologi RISHA tersebut merupakan program dari pemerintah. Namun masyarakat desa bayan mempercayai bahwasannya gempa tersebut dapat terjadi akibat bentuk keserakahan manusia. Masyarakat desa alam menginginkan membangun kembali pemukiman mereka dengan menggunakan kayu seperti yang berada pada kompleks adat bayan, dimana masyarakat Desa Bayan masih mempertahankan kepercayaan mereka. Pemerintah lebih menerapkan kebijakan dengan bergaya top-down dengan tidak melakukan komunikasi dua arah terhadap masyarakat Desa Bayan. Maka dalam hal ini pemerintah lebih berorientasikan pada bentuk inovasi dibandingkan pada sasarannya dengan tepat. Sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak diterima begitu saja oleh masyarakat Desa Bayan dengan alasan masyarakat desa memiliki trauma terhadap rumah dengan menggunakan batu meskipun rumah tersebut disinyalir dapat tahan terhadap gempa, masyarakat desa memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan bencana alam dan rumah dengan pemerintah, dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan norma dan adat sehingga mereka mencari jalan lain untuk membangun rumah tanpa menerima bantuan dari masyarakat namun dalam melakukan pembangunan rumah tersebut masyarakat desa mengalami kendala dari sisi ekologis, serta resistensi yang dilakukan masyarakat akibat situasi politik yang terjadi pada tahun 2019. Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat desa bayan dilakukan dengan menggunakan cara musyawarahadat, dan terjadi bentuk penolakan

pada unsur modern pada Masjid Kuno Bayan Baleq, serta kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah mereka sendiri melalui LSM, serta mencari jalan alternatif dengan tidak menggunakan rumah tahan gempa dengan menggunakan teknologi RASHA.

Penelitian yang ketiga yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Savonda Rizky Komorina (2017) dengan judul Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Anyar Surabaya Tentang Rencana Pembangunan Apartemen Dan Mall (Komorina, 2017). Didalam penelitian penulis menjelaskan bahwa kota surabaya yang semakin berkembang sehingga membuat para investor tertarik untuk melakukan pembangunan bisnis properti di wilayah kota Surabaya. Salah satunya dengan ingin membangun mall serta apartemen karena dirasa strategis oleh investor sehingga memilih lokasi pembangunan di jalan MERR II-C (Suramadu-Juanda). Bahwasannya dengan melakukan pembangunan tersebut maka akan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat Gunung Anyar khususnya dalam sektor ekonomi, hal tersebut dapat dilihat bahwasannya masyarakat kelurahan Gunung Anyar ini memiliki tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga pemerintah sangat antusias menyambut rencana pembangunan apartemen serta mall tersebut. Namun hanya saja masyarakat tidak menyetujui bahkan terjadi oenolakan secara langsung oleh masyarakat Gunung Anyar tersebut. Beberapa bentuk aksi telah dilakukan untuk menolak rencana pembangunan apartemen dan mall yang rencananya berada pada daerah Gunung Anyar. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat daerah Gunung Anyar dengan melakukan demonstrasi ke kantor pemasaran pembangunan apartemen tersebut, tidak hanya itu masyarakat juga melakukan perundingan dengan para investor secara damai dimana masyarakat tetap meolak dengan adanya pembangunan mall dan apartemen tersebut. Dengan adanya sikap resistensi yang telah dijelaskan tersebut menimbulkan konflik secara vertikal, yaitu diantara para elit yaitu investor dan pemerintah dan dengan masyarakat.

Penelitian yang keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Reza Agus Fansuri (2020) dengan judul (Fansuri, 2020) dalam penelitian ini membahas mengenai Dusun Gelogor merupakan dusun yang menguyuhkan pesona pada keindahan wisata alam

serta memiliki berbagai macam potensi yang sangat cocok untuk dapat dikunjungi sebagai tempat wisata oleh para wisatawan. Pengembangan objek wisata yang berada pada Dusun Gelogor ini tidak terlepas dari adanya peran masyarakat dan pemerintah desa yang memiliki kesadaran atas peluang dibidang pariwisata untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat yang berada diwilayah objek wisata tersebut. Dalam pengembangan desa wisata di dusun ini di kelola oleh lembaga kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Peran Pokdarwis ini sebagai subyek pembangunan, sebagai penerima manfaat dari peningkatan ekonomi masyarakat, serta sebagai peran ketiga dalam mengerakan serta menciptakan lingkungan serta suasana yang kondusif dilingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh Pokdarwis ini dalam mengembangkan wisata alam Otak Aik Tojang yang berada pada desa Lendang Nangka belum optimal namun telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat. Tentunya dalam proses suatu kegiatan berwisata terdapat beberapa kendala yang kerap terjadi yang disebabkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki pro dan kontra terhadap keputusan kegiatan wisata alam tersebut. Yaitu terjadi penolakan terhadap perkembangan pariwisata yang merupakan sebagai salah satu permasalahan yang cukup sering dijumpai, bentuk penolakan masyarakat terhadap adanya pariwisata diantaranya karena masyarakat setempat merasa terganggu dengan kedatangan pengunjung yang kedepannya dapat merusak kenyamanan masyarakat setempat sehingga membuat kenyamanan hidup mereka akan hilang. Masyarakat juga beranggapan bahwa para pengunjung akan merusak kelestarian alam yang ada. Serta ketakutan masyarakat terhadap perubahan budaya dan merusak nilai nilai yang berada dalam masyarakat setempat. Maka dari itu Pokdarwis dalam menanggapi resistensi dengan menggunakan beberapa cara yang tidak biasa yaitu dengan melakukan musyawarah kepada masyarakat setempat dengan menggunakan adat orang tua jaman dulu dengan memiliki keyakinan apapun permasalahannya jika kita telah duduk secara bersama-sama maka semua permasalahan akan dapat terselesaikan dengan baik. Kemudia dengan menggunakan budaya ketokohan setempat yaitu dengan menggunakan orang-orang yang dianggap dapat di hormati dan didengarkan oleh masyarakat setempat, serta membuat pamflet-

pamflet yang berisi hadist mengenai keindahan serta memberikan hadist-hadist tersebut agar dapat dibacakan oleh khatib pada saat sholat jumat.

Penelitian yang kelima yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yuzuf dan Zuly Qodir (2014) dengan judul Resistensi Atas Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Pada Masyarakat Orang Rimba Di Provinsi Jambi) yang diterbitkan oleh jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Qodir, 2014). Dimana dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa orang rimba dihadapkan pada perubahan sosial kultural dan lintas budaya sebagai simbol dari keagungan yaitu local wisdom yang semakin lama semakin terkikis habis, adanya suatu kebijakan pengelolaan taman nasional struktur sosial masyarakat orang rimba telah berubah. Faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan oleh orang rimba terhadap kebijakan pembangunan serta pengelolaan hutan yaitu terjadinya kekecewaan terhadap kebijakan pengelolaan taman nasional yang telah ditetapkan tanpa melibatkan orang-orang rimba dari pembentukan hingga penetapan bentuk kebijakan, orang rimba hanya dilibatkan dalam hal penetapan sistem zonasi saja dan sosialisasi. Terdapat hubungan kerjasama yang terjadi diantara oknum aparat pemerintah dengan masyarakat desa melalui sistem pasang badan yang dilakukan oleh orang rimba yang berawal dari bentuk tekanan dan pengaruh yang diberikan kepada orang rimba. Kemudian orang rimba telah hidup secara konsumtif maka mereka dituntut untuk dapat hidup bedampingan dengan masyarakat desa lainnya atau dapat dikatakan dengan orang terang dan orang rimba juga belum mampu untuk hidup yang setara dengan layaknya orang-orang terang. Terjadinya bentuk persaingan pada pengelolaan hutan dimana orang yang hidup dengan dinamis akan bersaing dengan orang terang dan sesama orang rimba untuk dapat secara terus menerus dapat mengakses sumber daya hutan yang ada. Maka yang bentuk resistensi atau penolakan yang dapat dilakukan oleh orang rimba yaitu resistensi yang dilakukan dalam bentuk berkelanjutan dalam bentuk menjual lahan yang berada di area lahan yang posisinya terletak dalam kawasan, melakukan demo, serta melakukan debat secara terbuka dengan petugas balai taman nasional, hingga melakukan aksi kekerasan secara kolektif . dalam bentuk perlawanan yang dilakukan tersebut telah mengalami

evolusi kedalam bentuk lainnya, maka dapat diartikan bahwa bentuk perlawanan dipahai tidak hanya dalam satu bentuk saja yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Penelitian yang keenam yaitu skripsi yang ditulis oleh R. Indra Tri Kusuma (2014) dengan judul Resistensi elit lokal dengan masyarakat terhadap perubahan penggunaan tanah (Studi Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman) (Kusuma, 2014). Dimana dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini membahas mengenai perubahan penggunaan tanah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu diantaranya, salah satunya menyebabkan berkurangnya tanah pertanian secara cepat yaitu dengan adanya pembangunan perumahan oleh para investor. Para elit lokal daerah sidomulyo memberikan pendapatnya dengan menyusutnya tanah atau lahan pertanian yang disebabkan oleh adanya pembangunan perumahan maka akan memiliki dampak yang negatif pada faktor ketahanan pangan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Maka dari itu elit lokal Desa Sidomulyo mengambil kebijakan untuk dapat melindungi tanah pertanian dengan melakukan penolakan pembangunan perumahan. Kemudian sikap dari masyarakat desa Sidomulyo itu sendiri terhadap perubahan dari adanya pembangunan tanah yang disebabkan oleh pembangunan perumahan merupakan sikap tidak mendukung atau sikap penolakan. Cara untuk melakukan penolakan adanya pembangunan perumahan yang berada di Desa Sidomulyo yaitu masyarakat mempertahankan tanah pertanian mereka atau dengan tidak menjual maupun melakukan pengalihan tanah yang mereka miliki kepada para investor tersebut. Sikap resistensi yang ditunjukkan oleh para elit maupun dari masyarakat desa hanya mereka lakukan padaperubahan penggunaan tanah yang disebabkan adanya bentuk pembangunan perumahan yang dilakukan oleh para investor saja, sedangkan pada perubahan penggunaan tanah yang diakibatkan oleh pembangunan rumah pribadi atau warisan masih banyak sekali dijumpai di Desa Sidomulyo.

Penelitian yang ketujuh yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Novrizal Arrifin dengan judul Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja Di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu (2017) (Arifin, 2017). Dimana dalam jurnal ini dijelaskan oleh penulis bahwa bentuk penolakan atau resistensi yang

dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan Hotel The Rayja karena semakin tingginya tingkat kesadaran kolektif masyarakat, tingkat solidaritas yang tinggi, memiliki rasa kepedulian bersama dan memiliki rasa memiliki terhadap sumber mata air Umbulan Gemulo yang membuat kesadaran kolektif didalam masyarakat. kesadaran kolektif telah berkembang hingga menjadi bentuk resistensi dengan terbentuknya forum ANJIR desa Bulukerto yang kemudian menghasilkan bentuk kesepakatan dan keputusan bersama, yaitu masyarakat memiliki kesepakatan untuk melakukan penolakan atau perlawanan terhadap Hotel The Rayja karena dengan beralasan bahwa Hotel The Rayja akan dapat mengancam kelestarian sumber daya alam mata air Umbulan Gemulo yang berada di Desa Bulukerto. Setelah mendapatkan keputusan bersama dengan forum ANJIR desa Bulukerto ini membuat masyarakat melakukan beberapa upaya untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan Hotel The Rayja, karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain dengan menolak adanya pembangunan hotel tersebut yang kedepannya akan dapat mengancam sumber penghidupan masyarakat yaitu sumber mata air Umbulan Gemulo. Bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulukerto yaitu dengan melakukan aksi masa, dengan melakukan protes ke Desa Bulu Kerto serta kecamatan Bumi aji serta melakukan aksi demo di Kecamatan Bumi aji dan pemerintahan Kota Batu, kemudia masyarakat juga melakukan aksi petisi save sumber mata air Umbulan Gemulo kemudian melayangkan gugatan terkait pembangunan hotel tersebut di Pengadilan Negeri Malang, Hingga masyarakat juga melakukan aksi demonstrasi ke Mahkamah Agung Jakarta. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak membuahkan hasil yang baik karena pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan Hotel The Rayja tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga menjadi keputusan yang mengambang dan membingungkan bagi masyarakat serta tidak memiliki jelesan lebih lanjut.

2. Penelitian Terdahulu terkait Pengembangan Desa Wisata

Penelitian pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurfadila (2018) dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang (Nurfadilah, 2018). Dimana dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan objek wisata alam Lewaja di Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh pemerintahan (DISPORA) dengan menyediakan sarana serta prasarana untuk dapat menunjang pariwisata. dengan melakukan pembangunan toilet, musholla, ruang ganti, kios kios UMKM dengan menjual kuliner dan sovenir, membuat lahan parkir dan pagar, namun dalam melakukan promosi pariwisata yang dijalankan oleh kepariwisataan Kabupaten Enrekang hanya melalui media cetak dan telekomunikasi saja. disamping itu juga jalan menuju tempat wisata alam Lewaja di Kabupaten Enrekang masih kurang baik untuk dapat dilalui. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam melakukan pengelolaan wisata alam Lewaja di Kabupaten Enrekang yang paling utama merupakan dukungan dari masyarakat desa tersebut dengan ikut serta dalam menjaga kebersihan didalam objek wisata sekitar tempat tinggal masyarakat setempat dan memiliki panorama alam yang indah dan masih alami yang membuat nilai tambahan untuk dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke wisata alam Lewaja di Kabupaten Enrekang yang didalamnya disuguhi dengan pemandangan alam air terjun yang indah dengan didukung dengan udara sejuk dan bersih sehingga dapat membuat para wisatawan merasa nyaman. Dalam faktor pendukung penulis juga menjelaskan terdapat faktor penghambat dalam melakukan pengelolaan wisata alam Lewaja di Kabupaten Enrekang yaitu pada umumnya keterbatasan bentuk anggaran membuat hambatan untuk melaksanakan pembangunan jalan menuju kedalam objek wisata tersebut, ditambah dengan bentuk promosi yang dilakukan masih terbilang kurang dan masih memiliki keterbatasan sumber air bersih pada masa masa musim kemarau.

Penelitian ke dua yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Magrifah T. Idris,dkk (2019) dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang) (Magrifah T. Idris, 2019) yang diterbitkan oleh jurnal LPPM Unisma. Dalam jrnal ini penulis menjelaskan

mengenai peran pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur merupakan hal penting untuk pembuatan sarana dan prasarana serta perbaikan fasilitas yang merupakan salah satu bentuk dalam melakukan pengembangan pariwisata yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dinas kebudayaan dan pariwisata telah melakukan pembangunan infrastruktur yang berlokasi di daerah Kampung Wisata Jodipan Dan Kampung Tridi. Meski tidak sepenuhnya pemerintah mampu membangun jembatan kaca sebagai bentuk akses penghubung antara kedua kampung wisata agar dapat mempermudah wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Tidak hanya itu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang juga memberikan bantuan berupa pemasangan lampu acrylic di Kampung Tridi serta pembuatan pagar besi untuk Kampung Wisata Jodipan. Untuk dapat menarik pengunjung maka diperlukan penggalan ide-ide kreatif dalam kepariwisataan supaya masyarakat sebagai pemilik dapat mempertahankan tempat pariwisata. kedua kampung melakukan pertemuan untuk dapat bertukar pikiran untuk dapat mengembangkan potensi-potensi desa yang dimiliki. Kemudian dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang memiliki peran dalam mekaskan pengembangan destinasi wisata yaitu diantaranya melakukan promosi melalui media sosial untuk dapat menarik minat pengunjung. Serta melakukan branding dalam membangun dan membesarkan nama daerah kampung wisata Jodipan dan Kampung Tridi. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan terdapat kurangnya peran pemerintahan dalam melakukan pengembangan kedua objek wisata tersebut yaitu terdiri dari kurangnya sumber daya manusia dalam membantu dalam melakukan pengembangan desa wisata. Serta kurangnya dana yang diberikan dalam melakukan pengembangan wisata yang membuat dampak pada peranan Disbudpar dalam mengembangkan kampung wisata yang berada di kota malang.

Penelitian ke tiga yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Eet Saeful Hidayat dan R Didi Djadjuli (2020) dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya (Djadjuli, 2020) yang diterbitkan oleh jurnal Universitas Galuh. Dalam penelitiannya penlis menjelaskan bahwa Desa Rakasabaya merupakan salah satu desa yang sedang gencar untur

mengembangkan pembangunan dengan diawali dengan melakukan pengembangan potensi alamnya yaitu curug kembar. Namun terjadi permasalahan yang dihadapi oleh peran pemerintahan setempat dalam melakukan pengembangan potensi objek wisata Curug Kembar yaitu pemerintahan desa rakabayasa telah menjalankan dengan baik perannya dalam dimensi peran sebagai investor dan peran pelopor serta pelaksana pembangunan yang dapat dilihat dari pembangunan serta pengembangan yang masih terus berjalan sedangkan dalam peran modernisator masih dikatakan rendah karena masih terkendala dengan belum ada kesamaan dari unsur pemerintah desa, BPD, LPM, aparatur pemerintah desa serta pada kontribusi masyarakatnya. Desa Rakabaya ini merupakan salah satu desa yang mengalami perkembangan dengan melalui penggalan dan pengembangan potensi yang ada dalam daerahnya yang diproyeksikan sebagai pioner dalam menciptakan kondisi masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungannya. Peran pemerintah sendiri sangat dominan sebagai aktor dalam melakukan pembangunan yang memberikan nyawa pada bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam implementasi terdapat faktor pendukung dan penghambatnya dalam menjalankan tujuannya untuk dapat mengembangkan wisata di desa Rakabaya. Faktor pendukung dalam pengembangan potensi wisata yaitu diantaranya terjadi regulasi sebagai payung hukum yaitu UU tentang desa, peraturan pemerintahan provinsi dan daerah, bentuk potensi fisik dan non fisik sebagai bentuk destinasi wisata baru dan memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran, serta terdapat proyeksi pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam mengembangkan potensi wisata alam yaitu diantaranya belum adanya regulasi yang berbentuk PERDES, kurangnya partisipasi masyarakat, persepsi yang terbentuk dari masyarakat, serta kurangnya daya dukung infrastruktur.

Penelitian keempat yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Nunun Nurhajati (2018) dengan judul Dampak Pembangunan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung) (Nurhajati, 2018). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata yang berada di desa mulyosari ini masih terus berjalan dengan melakukan upaya pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan

pengembangan ODTW (objek dan daya tarik wisata) karena dulunya Desa Mulyosari ini merupakan desa agropolitan maka setelah masuknya pariwisata maka desa ini berganti menjadi desa wisata. Dilihat dari segi kesiapan masyarakat desa lokal yang dilihat dari tingkat pendidikan, pengetahuan, hingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata telah cukup siap menghadapi berbagai potensi dampak yang nantinya akan timbul serta telah mampu untuk memaksimalkan potensi berupa peluang ekonomu yang tercipta dengan adanya bentuk pengembangan desa wisata Desa Mulyosari. Dengan adanya pembangunan pariwisata maka otomatis memiliki dampak dari segi ekonomi dan sosial budaya masyarakat tidak hanya memiliki dampak positif saja namun juga terdapat beberapa dampak negatif dalam proses pembangunan dan pengembangan pariwisata. dampak yang terjadi dari pembangunan pariwisata dalam segi ekonomi yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, berkurangnya tingkat pengangguran, dapat meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat, membantu dalam menanggung beban dalam pembangunan sarana prasarana dan meningkatkan pendapatan yang tinggi namun hanya musiman. Dalam segi aspek sosial budaya juga memiliki dampak diantaranya yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, dapat meningkatkan keteampilan, serta dapat melindungi pelestarian adat dan budaya.

Penelitian kelima yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Devi Febrianti dan Agung Suprojo (2019) dengan judul Analisis Dampak Wisata Terhadap Pemberdayaan Masyarakat yang diterbitkan oleh jurnal JISIP (Devi Febrianti, 2019). Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa dalam keberadaan objek wisata dapat membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat menjadi lebih baik dan lebih kreatif. Dimana dalam melakukan pengembangan wisata terhadap pemberdayaan masyarakat dengan adanya desa tridwi menjadikan masyarakatnya lebih memiliki wawasan untuk mengerti bahwasannya hidup di kawasan wisata bukan hal yang mudah dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk berkunjung menjadikan masyarakat sadar akan menjaga kebersihan lingkungan mereka. Kemudian juga terdapat berbagai macam rencana yang telah disiapkan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat setempat serta menambahkan fasilitas yang dibutuhkan untuk dapat membenahi dan memperindah kampung tersebut. Faktor

penghambat dari adanya pemembrdayaan masyarakat yaitu masyarakat yang memiliki ego tinggi serta memiliki rasa tidak percaya diri yang terlalu kuat sehingga menimbulkan sulit untuk menerima perubahan dan pembaharuan. hal tersebut menimbulkan konflik antar warga maka hal itu menjadi penghambat dalam proses pengembangan desa wisata tersebut.

Penelitian keenam yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Oktavia Suryaningsih dan Joko Tri Nugraha (2018) dengan judul Peran Lembaga Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal yang diterbitkan oleh Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) (Nugraha, 2018). Maka dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa lembaga desa memiliki peranan besar dalam pengembangan desa wisata dalam melakukan pengembangan pariwisata lembaga desa yang memegang peranan paling sentral yaitu pemerintahan desa dengan melakukan pengaturan sumber daya dengan membentuk pariwisata desa, memfasilitasi berbagai kegiatan yang bekerjasama dengan berbagai macam pihak swasta yang ingin melakukan investasi, dalam melakukan pembangunan desa pemerintah menggunakan pendapatan dari hasil desa wisata, dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan pelaku wisata, serta dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata dengan mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam setiap event. Dari adanya hasil kontribusi tersebut maka memiliki dampak pada banyaknya usaha-usaha baru yang baru didirikan oleh masyarakat desa tersebut, menimbulkan banyaknya lapangan pekerjaan, harga jual produk kerajinan menjadi meningkat, namun dalam pembahasan ini belum dijelaskan mengenai peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dari segi promosi, serta dalam peningkatan sarana serta prasarana.

Penelitian ketujuh yaitu artikel penelitian yang dituliskan oleh Komang Jaka Fedian,dkk (2019) dengan judul Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir yang dikeluarkan oleh jurnal Journal Of Indonesian Public Administration And Governmance Studies (JIPAGS) (Komang Jaka Ferdian, 2019). Dijelaskan oleh penulis bahwa hasil dalam penelitian ini membahas mengenai pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan

sebagai peluang yang baik. Dengan adanya permintaan wisatawan dalam suatu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani maka akan mendtangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dilingkungan tersebut dan dapat memberikan nilai ekonomis yang baik juga bagi masyarakat. Dalam melakukan pengembangan pariwisata juga terjadi beberapa dampak yang negatif seperti dapat merusak nilai-nilai historis pada daerah sekitar tempat wisata tersebut. Jika terjadinya kerusakan seperti pada lunturnya nilai-nilai budaya, perusakan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kepentingan ekonomi pada pemilik tempat wisata tersebut. Keuntungan dalam pengembangan pariwisata ini juga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja tetapi juga dirasakan oleh para pemilik industri pariwisata. Dalam pengelolaan pariwisata yang bertempat di pesisir pantai ini maka mereka menitikberatkan pada ekowisata dengan mengenalkan kepada para wisatwan mengenai budaya masyarakat serta kelestarian keindahan alam yang dimiliki.

Dari penelitian-penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam membangun sarana dan prasarana maka dalam membangun sarana dan prasana dibutuhkan peran pemerintah. Dengan memperbaiki fasilitas juga merupakan salah satu bentuk dalam melakukan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa lembaga desa memiliki peranan besar dalam pengembangan desa wisata dalam melakukan pengembangan pariwisata lembaga desa yang memegang peranan paling sentral yaitu pemerintahan desa dengan melakukan pengaturan sumber daya dengan membentuk pariwisata desa. Dalam penelitian lainnya menjelaskan mengenai resistensi yaitu suatu bentuk perlawanan maupun penolakan yang dilakukan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti membahas lebih dalam mengenai Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran mengenai alasan yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah desa dalam membentuk desa seloprojo menjadi desa wisata dan memberikan gambaran bagaimana resistensi

yang dilakukan oleh masyarakat mengenai kebijakan pengembangan desa wisata yang dicanangkan oleh pemerintahan Desa Seloprojo Kabupaten Magelang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data berupa bentuk pernyataan langsung dari apa yang diamati, menggunakan landasan teori yang berkaitan sebagai arah fokus pada suatu penelitian yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data tidak hanya menggunakan teori tetapi berdasarkan pada fakta-fakta berupa bentuk informasi dan keterangan yang dijumpai dilapangan, yang dapat diartikan bahwasannya peneliti mengambil data yang diperlukan dari para informan yang berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh peneliti secara wawancara, melakukan observasi, serta melakukan dokumentasi. Kemudian metode penelitian kualitatif juga dapat dideskripsikan sebagai bentuk tujuan untuk memberikan gambaran mekanisme hubungan dalam menyajikan informasi dari suatu fokus penelitian kedalam bentuk verbal serta dapat memeberikan gambaran fenomena sosial yang akurat dalam mengkaji penelitian (Suharsimi, 2002).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk dapat mendeskripsikan hasil penelitian, serta bentuk pemahaman secara komprehesif mengenai fenomena-fenomena yang akan dikaji secara mendalam dan menyeluruh, yaitu untuk mengetahui bentuk gambaran resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan desa wisata. Studi kasus itu sendiri merupakan bentuk metode penelitian kualitatif dimana dalam melakukan penyelidikannya atau pengamatannya mencakup pada kehidupan nyata, kasus kontemporer secara terbatas, atau dapat melalui pengumpulan data serta bertukar sumber informasi secara mendalam serta terperinci (Walhyuningsih, 2013). Dengan menggunakan pendekatan

studi kasus maka dapat memungkinkan peneliti untuk dapat mempertahankan bentuk karakteristik secara menyeluruh dan memiliki makna dari bentuk peristiwa di kehidupan secara nyata. dengan menggunakan studi kasus juga memiliki keuntungan dalam melakukan penelitian yaitu mereka sepenuhnya dapat berkorelasi dengan berbagi jenis bukti-bukti yang ada termasuk bentuk bukti wawancara, dokumentasi, serta bentuk observasi.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder digunakan sebagai pelengkap dari data primer.

- a) **Data primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan maupun sumber data dengan melakukan wawancara secara langsung dan melakukan observasi langsung ke lapangan agar dapat memperoleh data dan informasi yang tepat mengenai resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang
- b) **Data sekunder**, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumentasi, buku, maupun arsip yang telah ada. Data sekunder ini memiliki fungsi untuk melengkapi dan menunjang dari judul penelitian skripsi ini. Data sekunder ini dapat memenuhi data saat melakukan kegiatan observasi langsung di Desa Seloprojo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian, maka seorang peneliti memerlukan teknik pengumpulan data selama proses pengumpulan data. Metode dalam teknik pengumpulan data ini suatu bentuk upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta penelitian literatur sesuai dari segi produser pendukung dalam melakukan penelitian. Maka dalam melakukan penelitian resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang ini dibutuhkan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data, yaitu :

a) Observasi

Dalam penelitian ini, observasi partisipatif digunakan oleh penulis, dimana seorang peneliti berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sehari-hari pengamat atau juga dapat dipergunakan sebagai sumber data penelitian. Atau dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena di lingkungan yang akan diamati, singkatnya observasi ini merupakan kegiatan mencatat pola perilaku orang, kejadian kejadian di lokasi penelitian serta objek penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung atau observasi partisipan ke lokasi penelitian agar memperoleh data yang lebih lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga dengan menggunakan teknik ini dapat memberi kemudahan bagi penulis untuk dapat mengetahui resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang.

b) Wawancara

Dalam proses ini, seorang penulis melakukan wawancara percakapan secara langsung atau tanya jawab antara pewawancara dan narasumbernya. Dengan melakukan proses wawancara ini akan memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengakses data serta menemukan masalah secara lebih terbuka dan bebas. Dengan membawa beberapa alat yang dibutuhkan dalam proses wawancara seperti buku, laptop, kamera, maupun notes. Informasi yang terkandung didalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam menentukan permasalahan yang terjadi. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Desa Seloprojo
- Karang taruna Desa Seloprojo
- Masyarakat kelompok seni Desa Seloprojo
- Masyarakat Desa Seloprojo (pro dan kontra kebijakan desa wisata)

c) **Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi, dokumentasi digunakan untuk mendukung keabsahan data yang diberikan dengan melakukan dokumentasikan data data yang telah didapatkan untuk melakukan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang berupa buku, catatan, transkrip, dll, yang berbungan dengan pembahsan yang akan dibahas yaitu mengenai resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang.

4. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode untuk menganalisis data data yang telah diperoleh, sedangkan analisis data merupakan suatu proses untuk dapat menyederhanakan data agar saat diinterpretasikan akan lebih mudah untuk dibaca. Analisis data juga dapat deskripsikan dengan mencari maupun menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari adanya kegiatan wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumen dengan mengelompokan data-data, memecah data menjadi beberapa unit dan menggabungkan kedalam beberapa pola serta memilih mana yang lebih penting serta apa yang akan dipelajari nantinya serta dengan menarik kesimpulan agar dapat dipahami lebih mudah oleh diri sendiri maupun bagi orang lain yang membaca (Salebani, 2008). Kemudian menurut Miles dan Hiberman analisis data kaulitatif dilakukan secara langsung serta interaktif secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian hingga tuntas (Miles, 1992). Dalam melakukan analisis dimana komponen dalam melakukan analisis data interaktif Miles, Huberman, serta Saldana yaitu sebagai berikut ini:

a) **Reduksi Data**

Kondensasi data mengarahkan pada proses pemilihan, menyederhanakan, memfokuskan, serta mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan dari bagian catatan lapangan secara tertulis, wawancara, dokumen-dokumen serta materi empiris. Dengan merangkum data yang diperoleh agar dapat dipertegask dan memilih hal-hal yang tidak berkaitan dengan data yang diinginkan.

b) Penyajian Data

Penyajian data dapat didefinisikan sebagai suatu pengorganisasian, penyatuan, serta informasi yang disimpulkan. Mengolah data mentah kedalam suatu rangkaian informasi secara singkat dan sistematis terhadap semua peristiwa agar dapat dipahami oleh para pembaca. Dengan memberikan suatu gambaran berupa deskripsi yang sebelumnya belum jelas menjadi lebih jelas setelah melakukan suatu penelitian. Penyajian data disini juga dapat membantu dalam memahami suatu konteks penelitian karena melakukan suatu analisis secara lebih mendalam.

c) Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari awal melakukan peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat penjelasan secara keteraturan, serta alur sebab akibat yang menjadi tahap akhir untuk dapat menyimpulkan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Kesimpulan juga berarti seorang peneliti harus mengetahui apa yang akan ditemukan kemudian ditarik semua inti penjelasan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab II ini menjelaskan terkait kerangka teori yang digunakan oleh penulis yakni mengenai teori resistensi.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Dalam bagian bab III ini menjelaskan terkait bentuk gambaran umum, serta kondisi dan letak administrasi Desa Seloprojo.

BAB IV : BENTUK-BENTK RESISTENSI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA SELOPROJO KABUPATEN MAGELANG

Bab ini menjelaskan detail mengenai bentuk-bentuk resistensi pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo Kabupaten Magelang.

BAB V : ALASAN TERJADINYA RESISTENSI DALAM MASYARAKAT DESA SELOPROJO KABUOATEN MAGELANG

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai alasan yang melatar belakangi terjadinya resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo Kabupaten Magelang.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini akan menyampaikan hasil dari data-data yang telah ditemukan menjadi sebuah kesimpulan dari hasil penelitian, serta menambahkan saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian serupa bagi kedepannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

Guna menjawab permasalahan penelitian, peneliti menggunakan teori resistensi yang dicetuskan oleh James C. Scott, teori resistensi James Scott dilatar belakangi dari studi Scott mengenai perlawanan kaum tani yang berada di Asia Tenggara yaitu menunjukkan geraknya para kaum tani yang ditindas oleh kaum penguasa yang berkaitan pada biaya sewa tanah yang sangat tinggi yang diberikan oleh para tuan yang kaya raya serta pajak yang diberikan oleh negara. Hingga akhirnya petani merelakan tanahnya untuk dijual terhadap tuan tanah yang kaya serta bekerja untuk tuan tanah tersebut semata mata untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka. Hal ini membuat para petani kecil kehilangan hak atas tanah mereka karena dikuasai oleh para petani yang kaya karena memiliki modal yang besar. Dengan sulitnya mempertahankan tanah mereka sehingga dijual kepada tuan tanah yang kaya yang tak terlepas pada perubahan pasar global pada masa pasca kolonial menuju pada masa modern.

Paham kapitalistis mulai menguasai pasar yaitu dengan membangkitkan terjadinya kelas-kelas dalam masyarakat. seperti masyarakat yang memiliki modal maka mereka dapat bertahan dan begitupun kebalikannya jika suatu masyarakat yang tidak memiliki modal maka akan sulit untuk membangun usahanya sedangkan para petani yang memiliki lahan kecil hanya akan menjalankan usaha tani untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan mereka bukan semata mata hanya untuk meraup keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Namun jika para petani menjual tanah dan juga bekerja kepada tuan tanah yang kaya raya tersebut atau para petani ini menjadi penyewa tanah maka dalam hal ini dapat dilihat terjadinya adanya bentuk ketimpangan sosial.

Dalam pola hubungan patron-klien ini tidak digunakan untuk melindungi melainkan digunakan untuk melakukan penindasan dengan memberikan harga sewa tanah yang terlalu tinggi, negara merupakan tempat untuk melindungi rakyatnya bahkan memberikan pajak yang amat sangat memberatkan para kaum tani. Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut yang menyebabkan para kaum tani yang berada di Asia Tenggara melakukan pemberontakan karena para elit politik dan para pemilik modal telah

merusak moral ekonomi kaum tani. Maka dalam dinamika tersebut bagi James Scott merupakan bentuk dari resistensi yaitu respon yang dilakukan oleh masyarakat atas perlakuan penindasan serta ketidakadilan bagi kaum marginal (Scott, Moral Ekonomi Petani, 1988).

James C. Scott menyatakan, resistensi ataupun perlawanan merupakan segala tindakan yang diperbuat kelompok tertentu maupun kaum sub-ordinat yang diperlihatkan guna menyampaikan suatu penolakan ataupun pengurangan suatu klaim diantaranya seperti harga persewaan maupun pajak dengan ketentuan disusun terlebih dahulu oleh kaum superdiant. Sehingga menurut James C. Scott, resistensi (perlawanan) terbagi menjadi dua bagian yakni resistensi publik (public transcript) dengan kata lain merupakan perlawanan publik secara terbuka serta resistensi tersembunyi (hidden transcript) atau dengan kata lain merupakan perlawanan secara tertutup dimana perbedaan diantara kedua kategori terletak pada artikulasi perlawanan, bentuk karakteristik, wilayah sosial, serta budaya masing-masing resistensi. Resistensi publik terjadi ketika terdapat bentuk interaksi terbuka antara kaum subordinant terhadap kaum superdinant, sementara itu, resistensi tersembunyi terjadi ketika terdapat interaksi tidak langsung antara kaum subordinant terhadap kaum superdinant (Scott, Perlawanan Kaum Tani, 1993).

James C. Scott juga melakukan peninjauan definisi umum resistensi yakni melalui realitas di masyarakat sebenar-benarnya. Resistensi dijelaskan sebagai sesuatu dengan sifat organik, sistematis, serta kooperatif. Selain itu, resistensi juga memiliki prinsip yang kuat dengan tidak mengepentingkan diri sendiri, konsekuensi, revolusioner, dan juga memiliki cakupan berbagai gagasan dengan tidak melibatkan latar belakang kehidupan pribadi individu. Resistensi berfokus terhadap bentuk perlawanan yang benar terjadi dalam keseharian individu dengan pendeskripsian melalui bentuk perlawanan kaum minoritas lemah sebagai kaum yang tidak memiliki kekuatan apapun guna menolak secara terang-terangan dan jelas terlihat.

Maka berdasarkan pada pembahasan diatas, bahwasannya James Scott memiliki pandangan bahwa suatu perlawanan yang dilakukan karena memiliki penyebab yaitu terjadinya penindasan yang terjadi didalam kehidupan keseharian masyarakat. Perlawanan yang dipergunakan masyarakat yang tertindas merupakan alat agar mereka dapat melakukan pembelaan hak terhadap diri sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan bagi kaum

tertindas guna mampu mempertahankan subsistensi mereka guna melakukan penolakan perubahan dengan ketetapan yang ada melalui banyaknya gerakan perlawanan (Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, 1993).

James Scott mendeskripsikan bentuk resistensi dengan menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan perlawanan yang bersifat nyata serta bentuk perlawanan yang bersifat insidental pula. Bentuk resistensi secara nyata yakni memiliki sifat sistematis, terorganisir, serta bersifat kooperatif, berprinsip atau dengan kata lain tanpa pamrih, memiliki akibat revolusioner atau mengandung beberapa gagasan serta tujuan dalam meniadakan dominasi penindasan. Sedangkan dalam bentuk resistensi yang bersifat insidental ini lebih cenderung tidak terorganisasi, tidak sistematis serta individualistis, memiliki sifat untung-untungan dan berpamrih serta juga tidak memiliki akibat dalam bentuk revolusioner. Dalam bentuk resistensi yang bersifat insidental ini biasanya dilakukan oleh perorangan dan diwujudkan dengan melalui aksi-aksi pembangkangan ataupun suatu tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan karena bentuk resistensi yang tidak terorganisasi dengan baik (Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, 1993).

Maka sebagai bentuk pelengkapanya James Scott menggunakan istilah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh publik atau dikatakan sebagai bentuk perlawanan secara terbuka dan juga bentuk perlawanan secara tertutup atau dilakukan dengan bentuk individual. Bentuk perlawanan secara terbuka yaitu bentuk perlawanan yang terjadi berdasarkan pada proses mobilisasi oleh para partisipan, diatur dalam bentuk agenda yang terarah serta memiliki tujuan tepat dan sesuai sasaran. Sedangkan dalam melakukan perlawanan bentuk tertutup yaitu berupa bentuk pembangkangan serta dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi yang dilakukan dengan menggunakan nama individu. Perlawanan James Scott terbagi menjadi dua jenis jika dilihat dari sifat dan ciri seseorang dalam melakukan perlawanan terbuka (*public transcript*) maupun bentuk perlawanan secara tertutup (*hidden transcript*). berikut ini merupakan bentuk pemaparan jenis perlawanan oleh James Scott (Scott, *Moral Ekonomi Petani*, 1988).

1. Perlawanan Terbuka (*Public Transcript*)

Perlawanan terbuka (*public transcript*) merupakan bentuk perlawanan yang dapat kita amati, memiliki bentuk yang kongkret, dan secara langsung terdapat

bentuk komunikasi yang terlihat diantara dua belah pihak yang berselisih. Contoh dari bentuk perlawanan secara terbuka adalah bentuk pemberontakan yang memiliki sifat umum seperti halnya demonstrasi. Terdapat empat karakteristik yang menunjukkan bentuk perlawanan secara terbuka yang diungkapkan oleh James Scott yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a) Perlawanan yang wujudnya sesuai dengan sistem yang telah berlaku, dengan terorganisir dengan baik antara pihak satu dengan lainnya dan juga saling bekerja sama dengan baik.
- b) Bersifat rasional yaitu dengan memfokuskan pada bentuk kepentingan banyak orang.
- c) Memiliki tujuan untuk menghapuskan bentuk tindakan dominasi dan penindasan yang diterima dari kaum penguasa.
- d) Terdapat dampak- dampak perubahan dalam bentuk konsekuensi serta revolusioner, dalam melakukan pergerakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup (Scott, Moral Ekonomi Petani, 1988).

Bentuk perlawanan secara terbuka yaitu dengan mengarahkan pada sebuah pergerakan yang dilakukan secara sistematis dengan melakukan koordinasi yang baik antara pemimpin dengan anggota yang berperan serta melakukan perlawanan.

2. Perlawanan Tertutup (*Hidden Transcript*)

Perlawanan dalam bentuk tertutup (*hidden transcript*) merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan prosedur yang kurang sistematis. Melakukan perlawanan dengan cara tertutup cenderung akan mengacu pada bentuk gerakan penolakan dengan perlahan-lahan dengan melakukan perhitungan dalam melakukan perlawanan, pencapaian yang didapat dan penentuan sikap individu dalam bentuk pengorganisasian keinginan serta kemampuan untuk dapat melakukan bentuk perlawanan.

James C. Scott (Scott, Perlawanan Kaum Tani, 1993) telah menjelaskan terdapat empat karakteristik dari bentuk perlawanan tertutup, yaitu diantaranya sebagai berikut ini:

- a) Tidak terorganisasi dengan baik.

- b) Bersifat individual yaitu bertujuan hanya untuk mencari untung dengan berfokus pada bentuk-bentuk kepentingan setiap individu.
- c) Terjadi secara tidak teratur.
- d) Tidak mengandung pada dampak-dampak perubahan.

Kedua jenis bentuk perlawanan yang telah dijelaskan diatas maka menunjukkan bahwasannya masyarakat menjadikan perlawanan sebagai alat bantu mereka para kaum yang tertindas dalam mempertahankan kebudayaan serta sistem yang telah ada. Perlawanan yang dilakukan secara terbuka menunjukkan bentuk eksistensi perjuan dalam melakukan perlawanan yang diakui oleh masyarakat dikarenakan bentuk dari tindakannya dapat diamati, sedangkan dalam perlawanan secara tertutup memiliki kecenderungan tidak terdapat perwujudan secara nyata dalam kemunculan suatu tindakan, karena bersifat pada individualis dan juga dianggap dapat berpengaruh pada bentuk tatanan yang sudah ada dalam masing masing diri seseorang.

Faktor-faktor munculnya gerakan perlawan yang telah dijelaskan oleh James Scott, yaitu James C. Scott telah menggambarkan tranformasi tanah untuk mnejadikan komoditas yang dijual telah memiliki efek mendalam bagi para kaum tani. Kontrol pada tanah yang semakin lama semakin lepas dari genggaman masyarakat desa, petani yang secara progresif telah kehilangan hak mereka akan kebebasan, hak mereka dalam guna hasil dan menjadi penyewa tanah serta petani yang bekerja pada tuan tanah yang kaya raya. Fluktuasi pasar yang tak menentu sehingga semakin lama semakin mengukur nilai-nilai yang diproduksi (Scott, Moral Ekonomi Petani, 1988). Dalam studinya James C. Scott menunjukkan hilangnya hak hak kaum tani tas tanag mereka yang disebabkan karena pubahan pasae yang telah dikuasai oleh para kapitalik. Pemilik lahan yang kecil seringkali bergantung pada kaum elit bernah sehingga untuk urusan dalam pemelian benih, transportasi, perlatan serta pemasaran serta kebutuhan kredit (Scott, Perlawanan Kaum Tani, 1993).

Dengan begitu para pemilik lahan kecil akan berhutang kepada para pemilik lahan yang besar maka lama kelamaan mereka akan kehilangan tanah karena tidak mampu membayar hutang pada kaum elit tanah. Setelah para kaum tani kehilangan tanahnya maka akan secara otomatis mereka akan bekerja serta mengabdikan pada para

tuan tanah atau untuk menyewa lahan untuk mereka bisa melakukan bercocok tanam demi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan mereka dan keluarga. Dengan tingginya biaya sewa serta belum lagi tingginya biaya pajak maka dengan demikian menggerakkan para petani untuk melakukan pemberontakan karena terjadinya bentuk ketimpangan dan ketidakadilan tersebut telah merusak moral ekonomi para kaum tani yang mengolah tanah untuk keberlangsungan hidup mereka bukan untuk melakukan keuntungan.

Scott telah menjelaskan bahwasannya petani terbagi menjadi dua tipologi yaitu, pada tipologi pertama petani merupakan pencocok tanam yang tinggal dalam pedesaan, mereka berfokus pada usahanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para keluarganya dan terus menerus berputar pada bentuk perodik siklus tanam dan panen saja. Sedangkan dalam tipologi kedua, petani adalah masyarakat yang menggantungkan semua hidupnya pada pengelolaan hasil dari pertanian saja (Scott, Moral Ekonomi Petani, 1988). maka dalam tipologi ini menerangkan secara jelas akan bentuk pentingnya tanah bagi kaum tani sebagai bentuk lahan komoditi. Sehingga barangsiapa yang mengubah pola yang telah terbentuk sejak dahulu kala maka tentu akan dapat membangkitkan berlawanan untuk menentang pihak-pihak.

BAB III

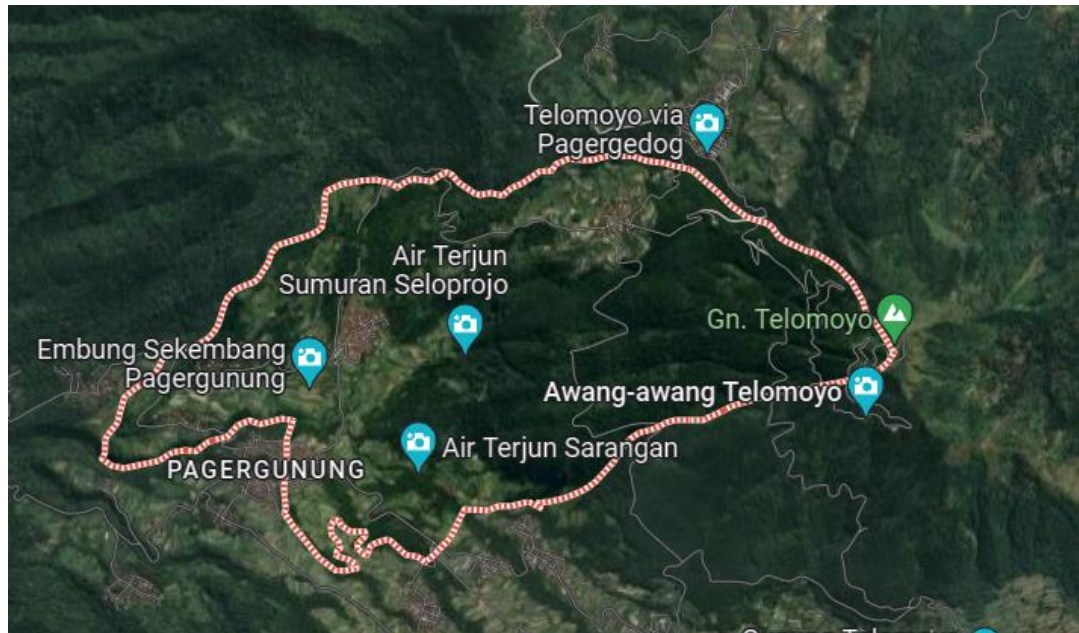
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Seloprojo

1. Kondisi Demografi dan Monografi

Seloprojo merupakan nama desa yang terletak di Ngablak, Kabupaten Magelang. Terletak di antara lereng Gunung Telomoyo dan Gunung Andong dengan ketinggian 1370 Mdpl dan kemiringan 90 derajat dan desa ini terbagi menjadi empat dusun yaitu Seloprojo, Pernolo, Ngaglik dan Pranten. Luas desa Seloprojo yaitu 299.444 Ha dengan kemiringan 90 derajat khususnya pada Dusun Pernolo dan Ngaglik sedangkan untuk Dusun Pranten kemiringannya hanya 15 derajat saja. Desa Seloprojo total memiliki 13 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW). Dengan jumlah terbanyak berada di Dusun Seloprojo yaitu 6 RT dan 2 RW, sedangkan Pernolo dan Ngaglik memiliki jumlah RT dan RW sama yaitu 2 RT dan 1 RW. Sisannya yaitu 3 RT dan 1 RW dipegang oleh Dusun Pranten. Penduduk Desa Seloprojo berjumlah 1733 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 881 jiwa dan perempuan 852 jiwa. Pada sebelah Selatan Desa Seloprojo berbatasan dengan Pagergunung, sebelah utara dengan Desa Wirogomo, pada bagian timur berbatasan dengan Perhutani, dan bagian barat dengan Desa Sambungrejo. Semboyan dari Desa Seloprojo berbunyi *Seloprojo Prasajo* yang artinya Desa Seloprojo yang sederhana. (Indrata, 2021). Desa Seloprojo berbatasan langsung dengan empat desa disekelilingnya yaitu:

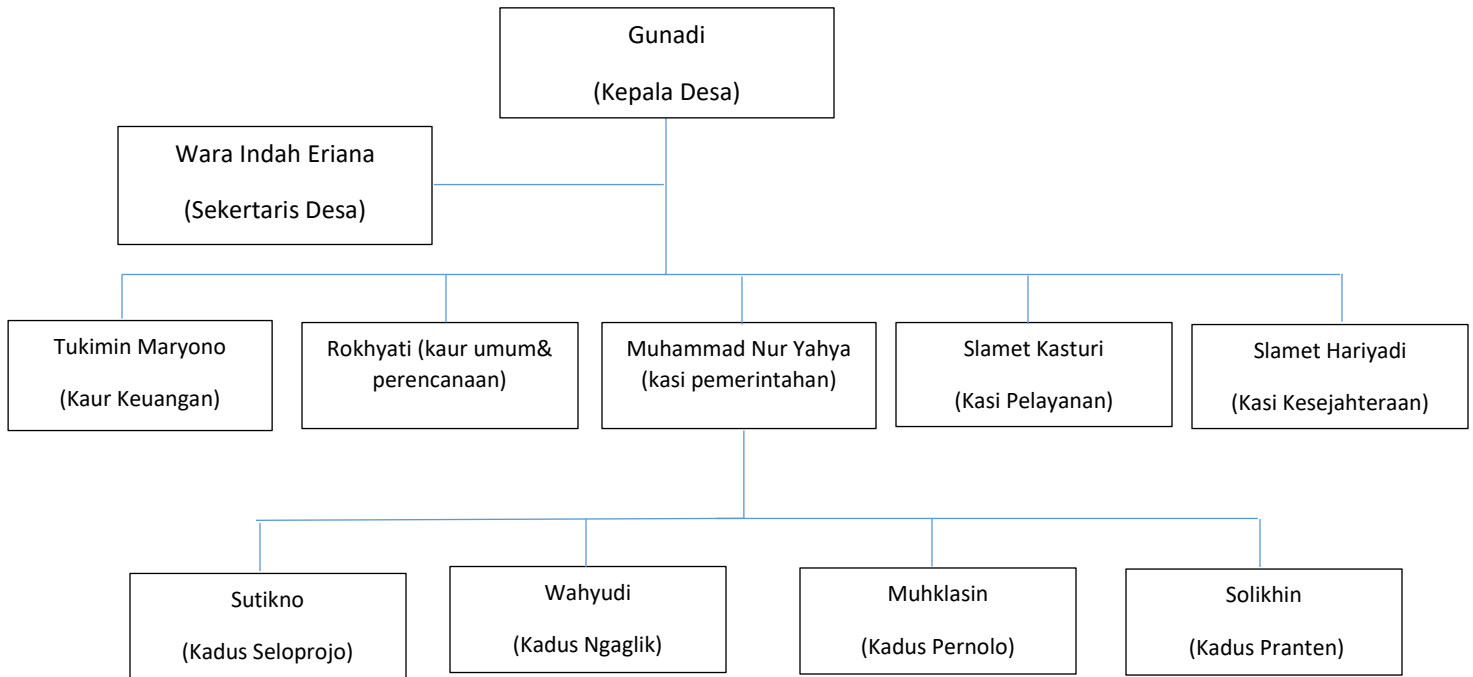
**Gambar 3.1 Demografi Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten
Magelang**



- Wilayah Barat : Desa Wirogomo
- Wilayah Utara : Desa Sambungrejo
- Wilayah Selatan : Desa Pagergunung
- Wilayah Timur : Desa Perhutani

2. Profil Pemerintah Desa Seloprojo

Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang



3. Sejarah Desa Seloprojo

Asal mula desa ini bernama Turok, berasal dari kata Watu Ngorok yang artinya batu mendengkur, filosofi dari nama ini juga artinya ketiduran. Nama itu ditemukan karena ada dua batu yang terletak tepat di tengah-tengah desa dan setiap malam jumat kliwon konon terdengar suara mendengkur. Oleh karena itu para warga salah mengartikan fenomena tersebut dan malah memberikan sesajen untuk dua batu itu. Hal itu membuat pemimpin serta tokoh agama Seloprojo berinisiatif menghancurkan batu itu sebagai upaya menyadarkan warga sekitar dan merubah nama desa menjadi Seloprojo, Selo artinya Batu dan Projo artinya Kerajaan, Jadinya Seloprojo berarti Kerajaan Batu. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa ditemukannya banyak batu di sekitaran desa ini. Pergantian nama ini juga memiliki tujuan agar tidak

ada kelaparan sesuai keinginan Sang Bahureksa desa. Walaupun begitu hingga saat ini warga desa masih banyak yang memberikan sesajen di sekitaran rumah mereka.

Desa ini memiliki keunikan tradisi bernama Merti Dusun yang pada setiap malam senin pahing akan mengadakan syukuran atas berkah panen yang tentunya akan diadakan berbeda-beda pada tiap dusunnya sekali dalam setahun. Merti Dusun diadakan melalui undangan mulut ke mulut dan bergantian sesuai kesepakatan tiap-tiap dusun. Khusus di dusun Seloprojo sendiri setiap malam jumat kliwon pada sekitar jam 9 sampai 10 malam akan mengadakan Mujadahan dengan membaca Arab Gundul (Huruf Hijaiyah tanpa harakat) serta memanggil tokoh Agama dari desa lain sebagai Ustadnya. Mujadahan ini diadakan oleh Bapak Gunadi selaku Kepala Desa untuk meningkatkan kebersamaan dalam beragama. Merti Dusun atau Tudesas sendiri merupakan tradisi yang masih dilestarikan di Desa Seloprojo. Tudesas berasal dari dua kata Metu yang artinya keluaran/hasil dan desa. Tradisi ini merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang telah diterima. Tradisi ini dilakukan dua kali selama setahun dan tidak hanya dilakukan saat panen saja yang diberi nama Tudesas Tandur, namun juga setelah panen yang diberi nama Tudesas Panen. Keduanya juga diadakan secara berbeda.

Tudesas Panen dilangsungkan secara meriah sedangkan Tudesas Tandur diadakan dengan sederhana hanya selamatan serta tahlilan di masjid. Dengan diadakan Tudesas tidak hanya mengajarkan rasa syukur terhadap Allah SWT saja namun juga mengeratkan tali silaturahmi serta menjalin gotong royong antar masyarakat serta untuk melestarikan kesenian dan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun menurun. Banyak orang yang salah mempersepsikan Tudesas dengan Safaran, hal itu mungkin didukung dengan persamaan keduanya yang diadakan secara meriah padahal perbedaannya juga banyak. Mulai dari susunan acaranya yang berbeda, lalu hari perayaan. Safaran diadakan setiap hari Rabu pada bulan Safar (Indrata, 2021).

4. Gambaran Sosial Ekonomi

Penduduk Seloprojo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, peternak, tukang kayu/batu, dan buruh lepas. Sisanya bekerja sebagai pengusaha sayur yang biasanya beroperasi di Kecamatan Grabag. Hal ini sesuai karena 47% wilayahnya

sebagai lahan pertanian. Ada juga warga yang bekerja sebagai pegawai negeri di kelurahan Grabag dan balai desa. Lalu untuk fasilitas pendidikan sendiri Desa Seloprojo memiliki 1 SD (Sekolah Dasar) yang berada di dusun Seloprojo dan 2 MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang masing-masing berada di Pranten dan Pernolo. Mayoritas masyarakat Desa Seloprojo menganut agama Islam. Rata-rata Pendidikan masyarakat desa adalah lulusan SMA dan Sederajat. Untuk pemudanya sudah banyak yang menempuh bangku perkuliahan khususnya di Dusun Pranten. Sedangkan untuk generasi tua karena banyak yang menyepelkan pendidikan sehingga rata-rata hanya lulus di bangku SD saja. Menurut Bapak Gunadi problematika tersebut disebabkan faktor dimanjakan oleh alam. Pernyataan itu dianalogikan bapak Gunadi dengan pemikiran karena semua yang dibutuhkan sudah disediakan oleh lingkungan sekitar sehingga tidak begitu membutuhkan usaha mencari uang. Sedangkan untuk kesehatan desa Seloprojo sudah memiliki posyandu yang letaknya persis di balai desa. Namun pemanfaatannya masih kurang maksimal karena permasalahan seperti Stunting masih banyak terjadi lalu permasalahan seperti nikah dini masih kerap terjadi khususnya di dusun Pranten. Desa juga masih mengandalkan Pustu (Puskesmas Pembantu) yang berlokasi di desa tetangga yaitu desa Pagergunung (Indrata, 2021)..

5. Potensi dan Keunggulan

Desa Seloprojo memiliki sumber mata air di atas tebing. Dari sumber mata air tersebut terdapat air terjun yang bernama air terjun Sumuran yang berlokasi di bagian barat desa, kemudian air terjun itu dijadikan objek wisata alam yang terbagi menjadi dua yaitu Air Terjun Sumuran merupakan air terjun yang besar serta terdapat tempat istirahat juga sudah ada sebuah gazebo di samping air terjun. Tidak hanya itu Desa Seloprojo juga memiliki wisata Hutan Pinus dan Pohon Akar, untuk Pohon Akar sendiri memiliki akses jalan yang agak sulit untuk dilewati terutama kendaraan roda empat. Wisata pohon akar memang harus melewati akses yang sulit namun jika sudah sampai di atas pohon, rasa capek dan usaha tersebut akan terbayarkan oleh pemandangan yang disajikan di atas pohon. Sayangnya untuk sektor pemanfaatan

pariwisata bisa dibilang kurang maksimal karena berbagai kendala seperti kesulitan dalam mem-branding, dan akses jalan yang sulit dilalui.

Untuk sektor Kesenian di desa Seloprojo memiliki banyak keunikan, bahkan tiap dusun memiliki kesenian yang berbeda. Untuk wilayah dusun Seloprojo memiliki kesenian berupa Wayang, Ketoprak, dan Njanen. Kemudian untuk dusun Ngaglik memiliki Kesenian Kuntulan dan Kuda Lumping. Lalu dusun Pernolo memiliki Jaranan dan Dangdutan. Dan dusun Pranten saat ini memiliki kesenian Soreng. Kesenian yang unik dan tidak ditemui di desa lain adalah kesenian Njanen. Kesenian-kesenian itu juga sering dipertunjukkan dalam acara-acara formal maupun informal desa bahkan saat ini sudah ada paguyuban Puspita Anjra yang menampung pelatihan Pewayangan, Karawitan dan Seni Tari. Potensi dari kesenian-kesenian ini bisa menjadi daya tarik dan identitas jati diri masyarakat Seloprojo (Indrata, 2021).

6. Gambaran Kebijakan Pariwisata Desa Seloprojo

Kebijakan pariwisata Desa Seloprojo tertuang dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Seloprojo tahun 2019 – 2025 dengan beberapa poin utama kebijakan pengembangan desa wisata sebagai berikut:

Pertama, Pengembangan desa wisata dilakukan dengan melihat potensi wisata alam pada sumber daya alam desa yaitu air terjun Sumuran, Seloprojo. Bahwasannya air terjun yang berada di desa seloprojo ini merupakan bentuk potensi alam yang hanya dimiliki oleh desa seloprojo dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena potensi alam yang dimiliki oleh desa seloprojo ini merupakan suatu anugrah.

Kedua, Mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan desa wisata yaitu dalam melakukan pengembangan desa wisata tidak terlepas dari bentuk dukungan masyarakat desa dalam proses pengembangan dan pembangunan wisata alam Air Terjun Sumuran Desa Seloprojo. Karena partisipasi masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan desa wisata, oleh karena itu diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan desa wisata.

Ketiga, Memberikan edukasi dan diskusi terbuka bagi masyarakat Desa Seloprojo terkait dengan perencanaan pembangunan desa wisata, sehingga

pemerintah desa memebirkan gambaran mengenai manfaat terhadap pengembangan wisata air terjun Desa Seloprojo.

Keempat, Memperbaiki dan meningkatkan (upgrade) fasilitas dan sarana prasarana yang berada di kawasan wisata Air Terjun Sumuran Seloprojo sebagai objek pengembangan wisata. Untuk menarik minat para wisatawan agar berkunjung dan berwisata ke air terjun sumuran maka pihak Desa Seloprojo harus memperbaiki serta meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana agar wisatawan yang berkunjung nyaman untuk dapat berwisata ke Air Terjun Sumuran Desa Seloprojo.

Kelima, Bekerja sama dengan karang taruna dalam proses pengembangan. Tentu dalam pengembangan desa wisata tidak bisa dilakukan sendiri, melaikan membutuhkan pihak pihak terkait lainnya seperti pada pihak karang taruna yang akan membantu dalam melakukan pengelolaan tempat wisata dan karang taruna juga dapat mempromisikan air terjun sumuran seloprojo, sehingga nantinya di harapkan wisata air terjun ini dapat dikenal oleh para wisatawan diluar daerah Desa Seloprojo bahkan hingga diluar daerah Kabupaten Magelang.

Kebijakan mengenai pengembangan desa wisata di Desa Seloprojo berupa air terjun memiliki sasaran kebijakan di mana, sasaran untuk kebijakan pengembangan Desa Wisata Seloprojo menurut hasil penelitian ini terbagi ke dalam dua sasaran yakni sasaran secara objektif dan sasaran secara subjektif. Sasaran secara objektif, pada sasaran ini yang dimaksudkan objek dari kebijakan pengembangan Desa Seloprojo yakni di mana air terjun itu sendiri itu merupakan sebuah objek potensi yang dimiliki oleh desa seloprojo dan peninggalan para leluhur hal ini merupakan sasaran Bapak Gunadi selaku kepala desa periode 2019-2025. Terkait kebijakan pengembangan desa wisata dengan tujuan untuk membangun Desa Seloprojo menjadi desa wisata dan memajukan Desa Seloprojo melalui pariwisata agar dapat menarik minat kunjungan masyarakat lain baik itu masyarakat desa lain atau kota kabupaten atau mungkin masyarakat di luar provinsi Jawa tengah untuk datang dan berkunjung di desa khususnya mengunjungi air terjun.

Sedangkan sasaran subjektif yang dimaksudkan yakni masyarakat di lingkungan sekitar Desa Seloprojo. Masyarakat desa seloprojo menjadi subjek sasaran dari kebijakan yang dibuat oleh bapak Gunadi selaku kepala desa baru

periode 2019-2025. Terkait kebijakan pengembangan desa wisata sendiri ini, tentu dalam pelaksanaan kebijakan ini Bapak Gunadi sendiri tidak dapat bekerja sendiri dalam mensukseskan atau mengimplementasikan kebijakan mengenai pengembangan desa wisata Seloprojo ini melainkan pak Gunadi harus dibantu oleh orang banyak atau harus mendapat dukungan dan support oleh banyak pihak untuk membantu mensukseskan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai pengembangan desa wisata ini agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai. Serta masyarakat Desa Seloprojo dijadikan objek sasaran dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengembangan desa wisata ini karena tanpa adanya dukungan masyarakat Desa Seloprojo maka implementasi mengenai kebijakan pembangunan desa wisata yang dibuat oleh Bapak Gunadi tidak akan berhasil.

Dengan dibuatnya kebijakan mengenai pengembangan desa wisata yang dibuat oleh Bapak Gunadi selaku kepala Desa Seloprojo periode 2019-2025 diharapkan dengan dibuatnya kebijakan ini pemerintah desa seloprojo dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung di Desa Seloprojo khususnya berkunjung di air terjun Sumuran Seloarjo, dengan menikmati keindahan Desa Seloprojo. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan ini, yakni dengan ingin menambah kunjungan wisatawan untuk berkunjung di desa Seloprojo dan memperkenalkan Desa Seloprojo sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa tengah.

Target selanjutnya yakni dengan mengimplementasikan kebijakan mengenai pembangunan desa wisata ini diharapkan Bapak Gunadi selaku kepala desa seloprojo periode 2019-2025 dapat membantu UMKM-UMKM masyarakat melalui pembangunan desa wisata di mana nantinya UMKM-UMK masyarakat akan dibuatkan tempat khusus dengan harapan ketika masyarakat berkunjung ke air terjun Desa Seloprojo masyarakat juga bisa pulang membawa oleh-oleh dari UMKM yang ada di Desa Seloprojo maka jika hal tersebut memang berhasil diimplementasikan, maka dengan adanya kebijakan mengenai pembangunan dan pengembangan desa wisata ini secara tidak langsung perekonomian masyarakat desa Seloprojo akan terbantu.

Dapat disimpulkan bahwasanya target yang telah ditentukan yakni dengan menarik minat kunjungan wisatawan untuk datang ke Seloprojo dan membantu UMKM adalah target yang ingin dicapai dalam kebijakan pengembangan desa wisata Seloprojo ini, meskipun pada pemimpin sebelumnya hampir memiliki kesamaan terkait target untuk menambah kunjungan dan membantu perekonomian masyarakat namun berbeda terkait kebijakannya di mana pada pemimpin sebelumnya yakni kebijakannya mengenai dasar budaya sedangkan pada pemimpin dalam periode ini yakni pak Gunadi kebijakannya mengenai pengembangan desa wisata dan Bapak Gunadi meyakini bahwa jika kebijakan pembangunan desa wisata ini berhasil diimplementasikan dengan baik, maka dua target tersebut sudah dipastikan tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan kebijakan pengembangan desa wisata.

Kondisi air terjun sesudah adanya perubahan kebijakan dan adanya resistensi dari masyarakat pada masa kepemimpinan saat ini oleh Bapak Gunadi telah mengalami banyak perkembangan. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan selama wawancara dengan kepala desa saat ini –Bapak Gunadi, mengatakan bahwa proses pengembangan desa wisata yang memanfaatkan wisata alam air terjun Sumuran telah berjalan sekitar 55% dalam pembangunan, seperti akses jalan menuju kawasan wisata Air Terjun Sumuran, penerangan jalan, sanitasi di kawasan wisata berupa toilet yang bersih, serta tempat berteduh wisatawan berupa gazebo juga ikut dibangun demi menunjang promosi objek wisata.

Pengunjung yang mendatangi objek wisata air terjun Sumuran juga bertambah sehingga wisata alam mulai ramai jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kepala Desa Seloprojo juga menambahkan jika pihaknya akan terus berbenah secara bertahap guna melakukan pengembangan desa wisata melalui pembangunan objek wisata alam Desa Seloprojo.

“Sejauh ini sudah 55 persen lah ya pembangunannya. Alhamdulillah wisatawan yang datang juga lebih rame dari tahun sebelumnya. Kita akan berusaha terus agar dapat membenahi wisata-wisata di Seloprojo ini. Pembangunannya ya jalan, penerangan, toilet, gazebo di kawasan wisatanya itu.” (Gunadi, 2022)

BAB IV

BENTUK-BENTUK RESISTENSI MASYARAKAT DESA SELOPROJO TERHADAP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pembahasan yang disajikan dalam Bab IV ini ialah menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu mengenai bagaimana bentuk resistensi masyarakat Desa Seloprojo terhadap arah kebijakan pengembangan Desa Seloprojo yang semula berorientasi sebagai desa budaya menjadi desa wisata. Pada saat kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata diresmikan oleh pemerintah Desa Seloprojo pada tahun 2019, hampir tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo. Masyarakat cenderung takut dan patuh dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi kebermanfaatan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, pada akhir tahun 2020 perlawanan-perlawanan berupa pelanggaran terhadap kebijakan mulai muncul dan semakin bertambah di tahun 2021 yakni pada saat implementasi kebijakan dimulai ketika pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran, Desa Seloprojo dilakukan. Hasil observasi menunjukkan bahwa ada sebagian warga yang tidak mematuhi perintah kepala Desa Seloprojo untuk ikut andil dalam pembangunan kawasan wisata, meskipun pada saat awal kebijakan disahkan, masyarakat telah menyetujuinya. Tindakan resistensi warga Desa Seloprojo terhadap pengembangan desa wisata terjadi setiap hari dan di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Resistensi tidak selalu terlihat, karena implementasi dari resistensi itu sendiri berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar “tidak ikut”, apatis, sampai pada aksi “perlawanan”, tergantung dari kadar perubahan maupun kekuatan individu ataupun kelompok yang resisten. Kadar perubahan itulah yang akan menentukan sikap perlawanan yang akan tercipta, bagaimana strategi melawan tersebut dilakukan, serta seperti apa bentuknya.

Arah kebijakan pengembangan Desa Seloprojo yang semula berorientasi sebagai desa budaya menjadi desa wisata merupakan perubahan besar bagi masyarakat Desa Seloprojo. Kebijakan pengembangan desa wisata yang digagas oleh kepala Desa Seloprojo saat ini menciptakan kesenggangan antar masyarakatnya dimana warga terbelah menjadi dua kubu yang berseberangan, yaitu masyarakat yang pro kebijakan dan masyarakat yang kontra dengan kebijakan. Kebijakan desa wisata yang digagas bertujuan untuk meningkatkan potensi Desa Seloprojo yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Sumber daya alam yang dimiliki Desa Seloprojo menjadi lebih istimewa sebab hanya Desa Seloprojo yang memilikinya,

diantara banyaknya desa tetangga sekitar Desa Seloprojo. Selain itu, kebijakan desa wisata diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pendapatan asli daerah (PAD) Desa Seloprojo dengan harapan masyarakat mau ikut berpartisipasi aktif dalam merawat dan melestarikan kawasan wisata alam air terjun Sumuran tersebut.

Jika dilihat dari analisa ekonomi, kebijakan desa wisata akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kebijakan desa budaya, karena melalui promosi desa wisata secara tepat, Desa Seloprojo akan lebih dikenal masyarakat luas bahkan dari luar daerah Kabupaten Magelang untuk berkunjung, apalagi pada saat ini wisata alam menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berasal dari kota untuk mencari ketenangan, atau dengan kata lain, wisata kekinian. Namun, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan dukungan penuh oleh masyarakatnya sendiri. Selain itu, kebijakan desa wisata akhirnya mengorbankan kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa kepemimpinan sebelumnya yaitu kebijakan desa budaya sehingga berdampak terhadap penurunan dari sisi kebudayaan dan kesenian asli desa yang menimbulkan resistensi dari masyarakatnya sendiri terkait kelangsungan kebijakan pengembangan desa yang baru, hal tersebut menjadi bukti konkrit bahwa pemerintah Desa Seloprojo lamban dalam mengatasi gejala sosial seperti ini.

Mengenai hal tersebut, kepala Desa Seloprojo saat ini –Bapak Gunadi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk meredam gejala sosial tersebut, hal ini disampaikan pada peneliti dengan mengatakan bahwa pemerintah desa telah menyediakan ruang diskusi terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait pelaksanaan kebijakan desa wisata di Desa Seloprojo.

“Buat masyarakat yang tidak setuju, kita sediakan ruang untuk diskusi. Apa yang mengganjal bisa dikeluarkan, kita buat evaluasi dan pembelajaran lebih lanjut. Saya juga selalu berusaha menemukan cara yang pas mendekati warga itu agar mau mendukung program saya ini, agar bisa diterima secara legowo juga.” (Gunadi, 2022).

Fakta mengenai kemunduran kebudayaan dan kesenian desa serta dana yang dialihkan terlalu banyak ke pembangunan kawasan wisata air terjun membuat masyarakat yang kontra dengan kebijakan melakukan sikap resisten terhadap pemerintah Desa Seloprojo. Sikap serta tindakan ini kemudian terakumulasi dalam bentuk perlawanan yang sepertinya tidak kasat mata, James Scott menyatakan *“everyday forms of resistance”* atau dijelaskan sebagai perlawanan yang dilakukan setiap hari memang cocok bagi tindakan resisten yang dilakukan masyarakat kontra

kebijakan guna menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemerintah desa, yang dalam hal ini merupakan kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata.

Menurut James Scott, resistensi berfokus terhadap bentuk perlawanan yang terjadi dalam keseharian individu melalui bentuk perlawanan kaum minoritas sebagai kaum yang tidak memiliki kekuatan apapun guna menolak secara terang-terangan dan jelas terlihat. Maka, James Scott mendeskripsikan bentuk resistensi menggunakan dua cara yaitu perlawanan yang bersifat nyata (resistensi terbuka) serta perlawanan yang bersifat insidental (resistensi tertutup). Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengelompokkan bentuk-bentuk tindakan resistensi masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata sebagai berikut:

A. Perlawanan Terbuka

James Scott membagi perlawanan ke dalam dua bentuk. Yaitu perlawanan terbuka dan tertutup. Perlawanan terbuka merupakan tindakan yang terorganisir seperti melakukan pemberontakan bersama kelompok tertentu yang memiliki tujuan untuk mengubah kebijakan atau melengserkan jabatan pemangku kebijakan yang secara tipikal mendominasi studi tentang perlawanan (Scott, 1993). Pada hakikatnya, perlawanan masyarakat Desa Seloprojo terhadap kebijakan pengembangan desa wisata dilakukan seperti halnya tindakan khas konflik pedesaan. Meskipun perlawanan dilakukan oleh masyarakat secara sadar di ruang publik dan diketahui oleh semua pihak, tetapi tidak ada kekacauan, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial yang terorganisir, maupun kekerasan secara terbuka melainkan pengambilan keputusan terorganisir yang melanggar kebijakan pemerintah Desa Seloprojo terkait kebijakan pengembangan desa wisata. Perlawanan-perlawanan tersebut diantaranya:

a) Melakukan Protes

Berlandaskan definisi kebijakan menurut James Anderson yang memaparkan kebijakan sebagai suatu langkah/tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu yang tengah dihadapi (Wahab, 2015), dimana tujuan kebijakan tersebut adalah terselesaikannya suatu masalah dengan tindakan. Maka, mekanisme pengambilan keputusan terkait RPJMDes terkait pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa

wisata dilakukan melalui forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Perlawanan masyarakat berupa protes dilakukan baik melalui forum-forum yang diselenggarakan pemerintah desa maupun terhadap kepala Desa Seloprojo secara langsung. Tindakan protes masyarakat yang kontra kebijakan dilakukan pada saat tidak sengaja bertemu dengan kepala desa maupun petugas pemerintah desa lainnya terkait kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata. Protes dilakukan agar pemerintah membatalkan arah kebijakan dan melanjutkan kebijakan masa kepemimpinan sebelumnya (Wawancara Sekretaris Desa Seloprojo, 2022).

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan pembelaan yang dilakukan masyarakat yang kontra kebijakan disampaikan dengan 2 (dua) inti pembicaraan yaitu kekhawatiran kemunduran kebudayaan dan kesenian serta penggunaan dana desa yang digelontorkan hanya untuk pembangunan kawasan wisata air terjun saja sehingga yang kegiatan lain mulai terabaikan. Seperti pendapat Rahman mengenai wisata air terjun di Desa Seloprojo yang sedang dikembangkan sebagai berikut:

“Saya pernah ngomong ke pak lurah langsung pas gak sengaja ketemu, intinya kita khawatir kalo-kalo budaya seni desa hilang soalnya kan udah gak terurus lagi itu, air terjun terus sekarang, terus itu pembangunannya juga banyak, nah yang lain apa gak mau diurusin sama desa, kok diliat-liat pembangunannya paling keliatan cuman di air terjun itu, yang lain gak keliatan pembangunannya apa aja.” (Wawancara Sintia, Kelompok Seni Seloprojo, 2022)

Sedangkan protes masyarakat kontra kebijakan dalam forum dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk mempertahankan keinginan maupun harapannya terkait masa depan Desa Seloprojo sebagai desa budaya tanpa meninggalkan kebudayaan leluhur yang telah lama dilestarikan, sekalipun kebudayaan dan kesenian asli Desa Seloprojo dirasa sudah maju dan telah dikategorikan berhasil menunjukkan perkembangan pesat dengan banyak mendatangkan pengunjung saat diadakan pementasan. Namun hal tersebut tidak membuat masyarakat puas dan masih mempertahankan pendapatnya terhadap kebijakan desa budaya seperti

periode kepemimpinan sebelumnya (Wawancara Sutikno, Kadus Desa Seloprojo, 2022)

Peneliti berpendapat bahwa tindakan protes yang dilakukan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan desa wisata jika dilihat dari keadaan sosial dan budayanya, Desa Seloprojo memiliki potensi untuk melakukan perlawanan terbuka sebagaimana yang disampaikan oleh Scott. Sebagai desa yang menjunjung tinggi kesenian dan kebudayaan dalam kehidupan kesehariannya, seni sudah pasti menjadi faktor determinan di Desa Seloprojo, dimana tokoh seni dan budaya menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu dapat menjadi modal besar bagi tokoh-tokoh tersebut untuk mengkoordinir masyarakat melakukan pemberontakan kepada pemerintah agar dapat mengubah kebijakan yang ada atau mendapatkan kekuasaan.

Ketidaksetujuan masyarakat Desa Seloprojo disampaikan pada forum forum saat kebijakan ini telah dibuat dan akan sosialisasikan apa saja kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada masa kepemimpinannya di mana salah satu kebijakan tersebut membahas mengenai pembangunan desa wisata disampaikan oleh kepala desa Seloprojo kepada masyarakat setempat. Penolakan lakan masyarakat atau resistensi yang dilakukan oleh masyarakat desa seloprojo tidak hanya dilakukan pada saat forum sosialisasi kebijakan kepala desa yang baru terkait desa wisata, namun pada saat kepala desa baru yakni pak Gunadi mengajak masyarakat untuk rapat mengenai apa saja potensi-potensi yang dapat dikembangkan apa saja kendala-kendala pada kepemimpinan sebelumnya apa saja yang sekiranya bisa membantu masyarakat dan juga memajukan Desa Seloprojo.

Pak Gunadi sendiri pada awal kepemimpinannya memang sering mengajak masyarakat untuk berdiskusi di dalam sebuah forum yang dilaksanakan di balai desa mengenai pemantapan program-program atau pengelolaan desa Seloprojo agar kedepannya desa Seloprojo lebih maju dan berkembang lagi, forum pembahasan atau diskusi pembahasan mengenai pengelolaan Desa Seloprojo dimulai oleh pak Gunadi pada bulan Maret 2019 satu bulan setelah Bapak Gunadi dilantik sebagai kepala Desa Seloprojo untuk periode 2019-2024. Kemudian forum diskusi tersebut

dilaksanakan oleh Bapak Gunadi beserta warga Desa Seloprojo setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali guna untuk membahas desa seloprojo kedepannya akan bagaimana. Setelah bulan Mei 2019 forum yang dibuat oleh Bapak Gunadi sudah berfokus pada pembahasan mengenai kebijakan yang ia buat untuk desa seloprojo yakni mengenai kebijakan desa wisata, pada bulan Mei Bapak Gunadi intens melakukan sosialisasi mengenai bagaimana pengembangan desa wisata untuk Desa Seloprojo sendiri sesuai dengan tujuan Bapak Gunadi yakni ingin memajukan desa seloprojo melalui pengembangan desa wisata. Namun pada saat Bapak Gunadi sudah mulai membahas secara intens mengenai bagaimana pengembangan Desa Seloprojo yang akan dikembangkan menjadi desa wisata pada masa kepemimpinannya di situlah warga mulai melakukan penolakan dimana penolakan warga juga konsisten jadi memang setiap forum selalu terjadi debat atau penolakan penolakan bagi masyarakat yang tidak setuju karena adanya pembangunan desa wisata dengan objek air terjun yang dimiliki oleh desa Seloprojo sendiri.

Seiring berjalannya waktu pada tahun-tahun berikutnya, pada forum diskusi ini yang dilakukan oleh kepala desa saat ini yakni Bapak Gunadi bersama masyarakat selalu terjadi penolakan. Namun puncak dari penolakan masyarakat terhadap pembangunan desa wisata di Desa Seloprojo ini terjadi pada saat kebijakan sudah matang secara konsep dan lain sebagainya dan akan disosialisasikan pada masyarakat di forum seperti biasa pada tahun Juni 2020. Sehingga pada forum inilah puncak dari penolakan masyarakat atau resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa wisata, yang menolak dan atau tidak setuju mengenai pembangunan desa wisata ini mereka tetap tidak setuju hingga akhirnya pak Gunadi selaku kepala desa mengajak masyarakat untuk voting apakah setuju atau tidak. Dan hasil dari voting tersebut memang sangat mengejutkan di mana masyarakat yang setuju sebesar 51% sedangkan masyarakat yang tidak setuju jika dipresentasikan sebesar 49%, hampir setengah desa kurang sedikit masyarakat yang tidak setuju akan adanya kebijakan desa wisata namun karena perolehan voting yang setuju lebih banyak dibanding yang tidak setuju mau tidak mau kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa seloprojo yakni pak Gunadi karena hasil voting menunjukkan bahwa lebih banyak yang setuju

dibanding tidak setuju meskipun selisih suaranya sedikit. Hingga saat ini pada saat forum dilaksanakan oleh pak Gunadi dan masyarakat sekitar guna membahas mengenai rencana dan progres terkait pengembangan desa wisata masih terdapat resistensi masyarakat terkait pembangunan desa wisata di Desa Seloprojo ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa ternyata masyarakat yang melakukan penolakan terkait kebijakan pembangunan desa wisata tersebut mengajak masyarakat yang awalnya setuju untuk tidak setuju namun beberapa masyarakat yang setuju dengan kebijakan pembangunan desa wisata Seloprojo ini tetap berpegang teguh pada pendiriannya yakni tetap setuju.

Namun, bagi masyarakat yang kontra terhadap kebijakan, fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa terdapat kemunduran dari sisi kebudayaan dan kesenian asli desa seperti kesenian Njanen, tari Jatilan, dan tradisi Merti Desa maupun Saparan ditambah dengan fakta bahwa dana desa yang sekarang lebih banyak diserap untuk proses pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran telah menjadi sebuah inspirasi untuk melakukan gerak perlawanan. Kebudayaan dan kesenian yang semula dijunjung tinggi oleh masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda terlupakan karena dukungan pemerintah desa tidak sebanyak dulu. Pemerintah Desa Seloprojo yang semula sangat mendukung acara-acara budaya dengan terselenggarakannya acara adat secara rutin kini mulai berpindah haluan dengan lebih banyak memusatkan perhatiannya ke pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran.

b) Menolak Mengikuti Program Kebijakan

Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Seloprojo terwujud melalui adanya pembangunan kawasan wisata alam air terjun Sumuran secara bertahap. Meskipun tidak melakukan pemberontakan hingga kekerasan secara terbuka, masyarakat Desa Seloprojo melakukan tindakan pelanggaran kebijakan dengan menolak untuk berpartisipasi secara aktif dalam program kebijakan pengembangan desa wisata, mulai dari menarik diri dari perkumpulan, menolak hadir dalam forum baik formal maupun non formal seperti rapat evaluasi pembangunan kawasan wisata, forum ibu PKK, hingga kegiatan tahlilan yang disisipi oleh aparat pemerintah Desa Seloprojo untuk melakukan sosialisasi

terkait kebijakan pengembangan desa wisata yang sengaja diselenggarakan oleh pemerintah Desa Seloprojo hingga diskusi yang diadakan Karang Taruna Desa Seloprojo, hingga tidak berpartisipasi dalam pembangunan kawasan wisata air (Wawancara Muslimin, Warga Desa Seloprojo, 2022).

Pengambilan keputusan tanpa adanya andil dari pemerintah desa menurut peneliti menjadi salah satu bentuk perlawanan terbuka yang memenuhi kriteria perlawanan terbuka pertama menurut Scott yaitu terorganisir, sistematis, dan kooperatif. Dimana penolakan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan desa wisata dilakukan tanpa melalui musyawarah resmi melainkan obrolan-obrolan santai antar warga. Informasi mengenai ajakan untuk tidak mengikuti segala macam bentuk program kebijakan desa wisata kemudian dikoordinir langsung oleh masyarakat setempat dengan menyampaikannya melalui mulut ke mulut dan *WhatsApp Group* (Wawancara Mukhlisin, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diperoleh informasi bahwa seringkali ketika akan dilakukan pertemuan resmi oleh pemerintah Desa Seloprojo guna membahas kebijakan pembangunan desa wisata, masyarakat enggan menghadiri acara tersebut. Sikap masyarakat yang kontra dengan kebijakan tersebut dilakukan karena mereka sudah terlanjur kecewa dengan kebijakan yang dirancang oleh kepala Desa Seloprojo saat ini, hal tersebut diperparah oleh sikap pemerintah desa yang dirasa masyarakat kontra terhadap kebijakan tidak menghiraukan aspirasi yang mereka sampaikan sebelumnya dan justru berfokus pada hal lain.

“Dhisik rapat dewe kalah suoro mbak, sing setuju karo rak setuju kacek sitik, terus keputusan akhire malah tetep disetujuni. Yowes to, timbang mangan ati mending rak sah moro sisan... (Dulu ada rapat kita kalah suara mbak, yang setuju dan tidak setuju selisih sedikit, terus keputusan akhirnya justru tetap disetujui. Yasudah, daripada makan hati tidak usah datang sekalian) (Wawancara Suryadi, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Resistensi masyarakat kontra kebijakan dengan menarik diri dari semua pertemuan, forum, ruang diskusi, hingga kegiatan kerja bakti antar warga yang diadakan pemerintah Desa Seloprojo, menurut James Scott merupakan resistensi simbolis, yaitu salah satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemerintah desa karena akumulasi kekesalan akibat di pertemuan maupun diskusi sebelumnya,

aspirasi dari masyarakat tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah Desa Seloprojo. Sikap tersebut juga dilakukan masyarakat yang kontra kebijakan untuk menunjukkan sikap atau paling tidak menurut mereka agar pemerintah desa menyadari ketidaksetujuan yang masyarakat rasakan akibat perubahan orientasi kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata. Resistensi yang dilakukan dengan perlawanan terbuka termasuk dalam perlawanan masyarakat secara formal dimana dilakukan pada ruang terbuka yang ditunjukkan langsung pada pemerintah Desa Seloprojo, kekecewaan masyarakat ditunjukkan secara nyata melalui bahasa yang baku dan sopan sebagai wujud rasa hormat masyarakat terhadap kepala Desa Seloprojo sekaligus penolakan terhadap kebijakan pengembangan desa wisata.

B. Perlawanan Tertutup

Perlawanan tertutup merupakan perlawanan yang dilakukan masyarakat serta mengembalikan rasa hormat kepada pihak penguasa. Bentuk perlawanan kedua yang digagas oleh James Scott adalah perlawanan tertutup. Perlawanan ini dikatakan tertutup karena aksinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang belum tentu orang tersebut sadar telah melakukan perlawanan. Sebagaimana kriteria perlawanan tertutup yang digambarkan Scott, perlawanan tertutup yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo tidak terorganisir dan bersifat individual dimana perlawanan tersebut bersifat insidental, berpamrih, tidak memiliki akibar revolusioner dan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem dominasi yang ada. Konsep ini sama dengan konsep perlawanan tersebar yang diusulkan oleh Mona Lilja dan Stellan Vinthagen dalam *Journal of Political Power* yang menyatakan bahwa:

“Perlawanan ini mungkin dilakukan oleh satu (atau beberapa) individu atau muncul sebagai praktik perlawanan yang tidak terorganisir yang dilakukan oleh banyak aktor di tempat-tempat yang tersebar. Dalam kasus terakhir, perlawanan yang tersebar dapat memiliki dampak besar, dan mengubah masyarakat, komunitas, bangsa, atau bahkan seluruh wilayah” (Vinthagen, 2018)

Perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan perilaku yang memungkinkan untuk masyarakat lain melakukan perlawanan serupa. Apabila hal tersebut terjadi maka akan semakin sulit bagi pemerintah Desa Seloprojo untuk melaksanakan tahapan implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Desa Seloprojo. Dalam

penelitian ini, pemerintah Desa Seloprojo merupakan sasaran utama masyarakat Desa Seloprojo dalam melakukan perlawanan. Selama melakukan penelitian di Desa Seloprojo, peneliti menemukan beberapa tindakan resistensi yang termasuk dalam bentuk perlawanan tertutup yaitu sebagai berikut:

a) Menggosip

Menggosip merupakan salah satu jenis resistensi argumentatif. Dalam kasus ini, perlawanan lebih mengarah kepada pemerintah Desa Seloprojo. Tindakan ini cenderung mudah dilakukan karena adanya kesamaan pemahaman masing-masing individu. Ketika kebijakan pengembangan desa wisata diputuskan, tidak sedikit masyarakat yang resah umumnya dalam hal kebudayaan dan kesenian asli Desa Seloprojo. Selain itu, banyak berita-berita yang bermunculan mengenai kemunduran kesenian desa hingga kucuran dana yang terlampau banyak untuk pembangunan kawasan wisata membuat kekesalan masyarakat memuncak. Menyikapi hal tersebut, warga Desa Seloprojo saling mengemukakan pendapatnya. Utamanya mengenai ketidaksetujuannya terhadap pelaksanaan kebijakan. Ketika melakukan interaksi tersebut, yang menjadi topik pembicaraan adalah kepala Desa Seloprojo. Gosip disebut oleh Scott sebagai senjatanya orang-orang yang kalah. Ia juga menyatakan bahwa gosip merupakan seni “perang” yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan citra orang yang sedang menjadi topik pembicaraan. Pada tindakan gosip ini, masyarakat Desa Seloprojo melakukan tindakan resistensi dengan mengomel dan menggerutu karena ketidaksesuaian kebijakan pengembangan Desa Seloprojo seperti yang diharapkan. Peneliti berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan warga guna menghindari konfrontasi langsung dari pihak pemerintah Desa Seloprojo. Sikap ini diambil karena dirasa aman serta keengganan masyarakat Desa Seloprojo yang nantinya berurusan dengan pemerintah desa. Sikap ini terlihat ketika peneliti melakukan observasi pada masyarakat Desa Seloprojo yang sedang berbincang di depan rumahnya dengan pantikan peneliti mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan desa wisata:

“Lurah saiki rak gelem ngerti karepe masyarakate mbak, sak penake dewe pokoke... wong dewe ngomong rak tau dianggep kok, wes akeh sing rak seneng lurah kui...”(Kepala desa yang sekarang tidak mau mengerti

keinginan masyarakatnya mbak, sesuka hatinya dia saja pokoknya... kita bicara tidak pernah dianggap, sudah banyak yang tidak suka dengan kepala desa sekarang...) (Wawancara Sri, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Rahman yang mengamini perkataan Shinta:

“Dia mah seenaknya sendiri, maunya terkenal ya dia sendiri yang mau itu, gak suka saya sama gayanya. Buang-buang duit desa aja, belum tentu juga bakal berhasil.” (Wawancara Agus, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Ketika perkataan tersebut selesai terucap, terdapat celetukan suara lain dari dalam rumah yang mengatakan bahwa satu keluarga tersebut memang tidak menyukai kepala desa sejak awal pemilihan kepala Desa Seloprojo. Hal tersebut memang tidak asing bila ada percakapan mengenai kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata di kalangan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan ini. Pembicaraan yang menjurus kepada penjatuhan dan menghilangkan rasa hormat pada pemerintah Desa Seloprojo selalu terjadi jika mereka melihat perkembangan (*progress*) pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran.

Sementara masyarakat yang kontra kebijakan lainnya membandingkan kepemimpinan kepala desa yang sekarang dengan kepala desa sebelumnya dengan mengatakan bahwa kepala desa sebelumnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang, karena lebih mendengarkan kemauan masyarakatnya dan dinilai lebih mencintai budaya serta kesenian asli Desa Seloprojo.

“Pak Kamdi dulu gak begini, kalo dulu lebih mendengarkan masyarakatnya, terus juga budaya sama seni jadi terangkat namanya. Kalo pemimpinnya cinta sama budayanya sendiri kan masyarakatnya juga ikutan cinta. Gak kayak sekarang lah.” (Wawancara Mukhlisin, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Anggota keluarga dari masyarakat yang kontra kebijakan juga mengatakan bahwa kebijakan pembangunan desa wisata justru membuat budaya dan seni khas Desa Seloprojo menghilang:

“Udah ilang budaya sama seninya, Pak Gunadi kan fokusnya ke air terjun, gak kayak Pak Kamdi dulu.” (Wawancara Suryadi, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Budaya menggosip yang dimiliki oleh masyarakat Desa Seloprojo dalam hal ini semakin masif dipraktekkan. Peneliti berpendapat, meskipun terkesan tidak membahayakan karena tidak ada perlawanan secara terbuka yang melawan pemerintah, namun ketika ujaran yang disampaikan dalam obrolan tersebut mendoktrin masing-masing orang yang terlibat maka akan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Seloprojo. Hal itu nantinya akan sangat menghambat jalannya kebijakan desa wisata dalam hal ini khususnya pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran, Desa Seloprojo.

Peneliti juga berpendapat bahwa aktivitas menggosip yang telah peneliti jabarkan di atas akan mengakibatkan penarikan rasa hormat kepada penguasa. Rasa kecewa terhadap keputusan pemerintah desa yang justru mengubah arah kebijakan pengembangan desa menjadi alasan terbesar masyarakat hilang respek terhadap pemerintah Desa Seloprojo.

b) Bersikap acuh tak acuh

Pemerintah daerah di Indonesia telah sejak lama mendapatkan hak otonomi untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, tidak terkecuali pada struktur pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya agar pemerintah desa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya baik melalui peningkatan pelayanan publik hingga perumusan kebijakan yang mengatur masyarakat dan potensi di suatu daerah.

Pemerintah seringkali menerapkan kebijakan yang tanpa disadari menjadi dampak dari situasi yang tidak terkoordinasi dan tidak sinergis dari beberapa informasi yang dapat ditanggapi. Seperti halnya keberadaan RPJMDes yang menjadikan bapak Gunadi selaku kepala Desa Seloprojo berupaya untuk mengaktualisasikan program demi program yang telah disusun dan disahkan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata Seloprojo, namun justru mendapatkan tanggapan masyarakat Desa Seloprojo yang bersikap acuh tak acuh terhadap kebijakan pengembangan desa wisata di desanya.

Sikap ini terlihat salah satunya ketika kepala Desa Seloprojo ataupun pemerintah desa yang mendatangi masyarakat kontra kebijakan untuk melakukan

pendataan maupun bertemu secara tidak sengaja ketika berkeliling desa. Mereka bersikap kurang kooperatif terhadap kepala desa maupun pada petugas pemerintah desa tersebut (Wawancara Gunadi, Kepala Desa Seloprojo , 2022).

Peneliti menemukan tindakan acuh tak acuh pada saat kepala desa menyapa masyarakat kontra kebijakan dengan hanya disambut dengan anggukan dan ekspresi malas pada saat menemani bapak Gunadi ketika akan mendatangi kawasan air terjun Sumuran bersama dengan pernyataan kepala desa tersebut yang menyatakan:

“Ngono kui mbak, nek kulo lewat mung ngangguk mawon, mboten purun ngendikani...(Seperti itu mbak, kalau saya lewat hanya mengangguk saja, tidak mau ngomongi...) (Wawancara Gunadi, Kepala Desa Seloprojo , 2022)

Kepala Desa Seloprojo periode saat ini juga menambahkan sekalipun bersikap acuh tak acuh namun masyarakat yang kontra dengan kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata tetap taat dengan peraturan yang berlaku di Desa Seloprojo.

Sikap acuh tak acuh ini juga terlihat dari ketidakantusiasan masyarakat terhadap pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran, mereka memilih tidak peduli mengenai pembangunan fasilitas yang memadai di kawasan air terjun maupun akses jalan menuju kawasan objek wisata. Hal tersebut juga disampaikan oleh perwakilan Karang Taruna yang peneliti wawancarai guna memperoleh informasi terkait bentuk resistensi masyarakat kontra terhadap kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata.

“Iya mereka yang nolak gak pernah mau dateng, kerja bakti gak mau dateng, gak mau bantu-bantu juga. Beneran dibiarin aja gitu, kalo kata mereka yaa sepolahnya pak lurah saja.” (Wawancara Hendra, Karang Taruna Desa Seloprojo , 2022)

Peneliti berpendapat bahwa sikap acuh tak acuh masyarakat yang kontra kebijakan ini berawal dari kekecewaan mereka terhadap sikap pemerintah Desa Seloprojo yang seolah mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan RPJM Desa Seloprojo 2019-2024 hanya sebatas formalitas untuk menjaring masukan masyarakat terhadap rancangan kebijakan pengembangan desa

wisata yang sebenarnya “sudah jadi” terlebih dahulu dimana ketetapannya telah diatur pihak-pihak tertentu sehingga pengambilan suara pada forum musyawarah RPJM Desa Seloprojo tidak berlaku dan masyarakat hanya bisa pasrah dan mengelus dada mengenai perumusan kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata (Wawancara Sri, Warga Desa Seloprojo, 2022).

Perlawanan tertutup yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra kebijakan pengembangan desa wisata Seloprojo dalam argumentasi peneliti termasuk dalam perlawanan non formal yang mana dilakukan secara lebih eksplisit dibandingkan dengan perlawanan terbuka. Masyarakat lebih berani dalam mengambil tindakan resistensi sekalipun tindakan tersebut tidak dapat menghasilkan suatu perubahan maupun tanggapan terkait pelaksanaan kebijakan desa wisata. Masyarakat yang kontra melakukan perlawanan tertutup secara non formal sebagai tanggapan atas ketidakpedulian pemerintah maupun kealpaan pemerintah dalam memberikan tanggapan atas usulan, kritik, maupun saran yang dikeluarkan dalam forum resmi pemerintah Desa Seloprojo.

BAB V
ALASAN TERJADINYA RESISTENSI DALAM MASYARAKAT DESA SELOPROJO
KABUPATEN MAGELANG

Perlawanan terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah terkait kebijakan pengembangan desa wisata merupakan hal yang masif dilakukan selama proses pelaksanaan pengembangan desa wisata. Hobbes dalam pandangannya menjelaskan bahwa manusia rasional harus menghormati dan mematuhi perintah mereka (pemerintah) karena tanpanya masyarakat akan terjerumus ke dalam perang saudara (Heywood, 2018). Namun persepsi tersebut agaknya kurang tepat ketika dihubungkan dengan perlawanan kondisional akibat implementasi kebijakan ini. Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, pada awal peresmian kebijakan pengembangan tidak terdapat perlawanan yang berarti terkait kebijakan pengembangan desa wisata namun perlawanan tersebut mulai dilakukan sejak akhir tahun 2020 dan semakin masif dilakukan pada tahun 2021.

Peneliti berargumen bahwasannya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo sama dengan konsep etika subsistensi atau etika untuk bertahan hidup yang dipaparkan oleh James Scott yang melandasi segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial mereka di pedesaan, termasuk pembangkangan mereka terhadap inovasi yang datang dari penguasa mereka (Siburian, 2019). Begitu pula dalam kasus resistensi masyarakat Desa Seloprojo terhadap kebijakan pengembangan desa wisata ini, keputusan yang diambil oleh warga yang melakukan resistensi atas kebijakan tersebut beberapa diantaranya menggunakan konsep etika subsisten dan beberapa lainnya memiliki alasan rasional pula dibalik pilihan tersebut.

Setelah dilakukan observasi secara mendalam dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait disimpulkan bahwasanya resistensi masyarakat terkait pengembangan desa wisata yakni karena dua alasan pertama karena kebudayaan yang kedua karena keuangan. Alasan pertama penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo atau resistensi yaitu karena masyarakat Desa Seloprojo takut bahwa dengan adanya kebijakan pembangunan desa wisata ini kebudayaan peninggalan luhur yang dilestarikan oleh pemimpin sebelumnya dan sebelumnya lagi akan hilang dan terlupakan. Kebudayaan tersebut berupa kesenian tari. Yang memang rutin dilakukan secara rutin dan terus berulang oleh masyarakat desa Seloprojo.

Menurut wawancara dengan salah satu masyarakat hal ini disampaikan oleh masyarakat yang melakukan resistansi terhadap kebijakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Bapak Gunadi mengenai pengembangan desa wisata tidak membahas mengenai kebudayaan sehingga Bapak Gunadi dalam forum diskusi terlalu membahas mengenai bagaimana membangun infrastruktur yang baik pada air terjun, bagaimana mempromosikan air terjun tersebut agar menarik wisatawan datang berkunjung ke desa Seloprojo, dan dalam kebijakan tersebut tidak menjelaskan bagaimana dengan kegiatan kesenian, apakah event untuk pertunjukan kesenian karena pada pemimpin-pemimpin sebelumnya memang di dalam kebijakannya terkait kesenian memang sudah diatur dan direncanakan sematang mungkin akan tetapi pada kepemimpinan saat ini hal tersebut tidak jelas mengenai kesenian. Hingga saat ini pun kesenian tersebut sangat jarang dibuatkan acara pertunjukan dan kegiatan latihan rutin yang biasanya dilakukan secara intens pada pembayaran sebelumnya akan tetapi pada pemimpin baru ini sangat sangat jarang karena terlalu berfokus pada pembangunan desa wisata sehingga masyarakat tetap konsisten dan tetap Keke dengan pendiriannya berupa ketidaksetujuannya terkait pengembangan dan pembangunan seloprojo serta menjadikan desa seloprojo menjadi desa wisata.

Alasan kedua penolakan masyarakat terkait kebijakan pengembangan desa wisata Seloprojo yakni tentang keuangan. Beberapa masyarakat yang melakukan resistansi terhadap kebijakan pembangunan desa wisata seloprojo berpendapat bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pembangunan desa wisata ini tentu akan sangat banyak sekali membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan memperbaiki infrastruktur pada air terjun seloprojo. Meskipun dalam pembangunan desa wisata ini akan dibantu oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi namun tetap saja dana yang diberikan oleh pemerintah kurang pasalnya pada saat forum pembahasan perencanaan terkait apa saja yang ingin dibangun atau diperbaiki pada bulan Januari misalkan antara yang direncanakan dengan yang dieksekusi selalu nambah contohnya rencananya bulan Januari ingin memperbaiki gazebo atau membangun gazebo pada forum telah dibahas bahwa untuk rencana pengeluarannya sebesar misalnya 10 juta nah namun pada saat pelaksanaan ternyata pengeluarannya mencapai 15 juta karena tambahan ini itu ini itu, dan hal tersebut menyebabkan dana yang diberikan dari pemerintah kabupaten atau provinsi habis sebelum waktunya. Selain itu tentu dalam pembangunan desa wisata membutuhkan sponsor atau donatur karena jika mengandalkan pemberian dana dari pemerintah kabupaten atau provinsi itu tidak cukup.

Masyarakat yang resistensi tidak mau membantu memasukkan proposal pengajuan dana dengan alasan bahwa mereka saja tidak setuju kenapa mereka harus repot-repot membantu mencarikan dana dan masyarakat yang melakukan resistensi terhadap kebijakan desa wisata meyakini bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan desa wisata ini akan jauh melenceng dari perkiraan awal oleh karena itu setiap forum yang diagendakan oleh Bapak Gunadi selaku kepala desa selopurojo. Masyarakat yang melakukan tindakan resistensi tetap konsisten hingga saat ini bahwa mereka menolak akan adanya pengembangan air terjun di Desa Seloprojo untuk pembangunan desa wisata. Oleh sebab itu, pada Bab 5 ini peneliti membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang kemudian mendorong masyarakat Desa Seloprojo untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pengembangan desa wisata serta menyampaikan tanggapan pemerintah Desa Seloprojo melihat resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo.

A. Faktor Penyebab Resistensi Masyarakat Desa Seloprojo Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dikatakan berhasil ketika paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yaitu hasil (*output*) atau bentuk konkret (nyata) dari pelaksanaan kebijakan serta keluaran (*outcome*) dalam bentuk tercapainya pengertian masyarakat, menghasilkan manfaat yang beragam dampaknya baik bagi individu maupun kelompok entah dampak tersebut merupakan sesuatu yang diinginkan atau justru tidak diinginkan masyarakat.

James Scott (1993) dalam studi perlawanan kaum tani menjelaskan bahwa faktor penyebab timbulnya perlawanan dari kaum tani kepada pemilik tanah adalah hilangnya hak kaum tani atas tanah yang menciptakan eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk mahal biaya sewa tanah karena berkewajiban membayar untuk tuan tanah dan pajak negara. Kehilangan tersebut awalnya terjadi karena perubahan pasar yang dikuasai kapitalistik, selain itu pemilik lahan kecil sering bergantung pada elit

bertanah misalnya untuk urusan pembelian benih, peralatan, transportasi dan pemasaran serta kadang-kadang kebutuhan kredit sehingga membuat hutang mereka semakin menggunung. Seperti halnya kaum tani Sedaka yang ada di Malaysia, masyarakat Indonesia khususnya Desa Seloprojo juga kehilangan hak kebebasannya dari segi kebudayaan dan kesenian karena kebijakan yang diatur pemerintah desa terkait kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata. Meskipun memiliki dalih untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi masih terdapat perlawanan-perlawanan atas kebijakan tersebut. Berikut simpulan yang diperoleh peneliti berdasarkan observasi dengan masyarakat Desa Seloprojo terkait faktor yang melatarbelakangi resistensi masyarakat terhadap pemerintah Desa Seloprojo mengenai kebijakan pengembangan desa wisata:

a) Kekhawatiran Kesenian dan Kebudayaan Asli Desa Seloprojo Menghilang

Kebijakan yang berubah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Desa Seloprojo terutama pada kesenian dan kebudayaan asli Desa Seloprojo, masyarakat menilai bahwa kebijakan pengembangan desa wisata membuat kesenian Desa Seloprojo menjadi terabaikan, sehingga merasa bahwa usaha yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya –Bapak Sukamdi, menjadi sia-sia dan dianggap tidak menghormati usaha yang dibangun susah payah tersebut, hal itu disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan desa wisata, Ibu Sri saat diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“Saya khawatir nanti kesenian jadi hilang, terus malah dilupakan sama masyarakatnya sendiri. Kalo bukan kita yang menjaga lalu siapa, kan begitu. Kalo jadi desa wisata ya bagus sih, tapi yang kemaren (kebijakan desa budaya) jadi sia-sia gitu, susah-susah dibangun kok sekarang malah diabaikan.” (Wawancara Sri, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Kekhawatiran lain juga disampaikan oleh anggota kelompok seni Seloprojo. Kasiah menjelaskan bahwa kebijakan yang sekarang menjadikan kesenian yang dulu sudah hidup, redup kembali karena fokus pemerintah Desa Seloprojo sudah berbeda. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta di lapangan dimana kegiatan pelatihan kesenian Njanen maupun tari Jatilan yang semula diadakan rutin kini telah jarang dilakukan, bukan tanpa sebab hal tersebut terjadi. Anak-anak yang semula ikut berlatih bersama kelompok seni Seloprojo kini mulai tertarik dengan

wisata baru di Desa Seloprojo yaitu air terjun Sumuran, sehingga anak-anak lebih senang bermain disana dibandingkan dengan mengikuti latihan kesenian Njanen dan tari Jatilan seperti dulu. (Wawancara Kasiah, Kelompok Seni Seloprojo, 2022)

Gambar 5.1 Kegiatan Latihan Kesenian Desa Seloprojo



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Desember 2022

Masyarakat yang kontra dengan kebijakan pengembangan desa wisata juga mempertanyakan kebijakan yang berubah dan tidak melanjutkan kebijakan sebelumnya saja yang dianggap mendapat dukungan penuh dari masyarakat Desa Seloprojo. Menurut Mukhlisin, dengan melakukan pengembangan wisata alam ini justru menyebabkan penyimpangan tujuan dalam memajukan Desa Seloprojo karena dalam kebijakan saat ini telah meninggalkan kebudayaan leluhur yang telah lama ada dalam ruang lingkup masyarakat desa.

“Kenapa tidak dilanjut saja kebijakan yang dulu, yang dulu juga bagus. Kalo yang ditujukan untuk menarik wisatawan, dulu juga sudah ada wisatawan datang kok tiap ada Merti Desa, rame juga dulu. Saya juga takut nanti malah warisan leluhur tergerus jaman apalagi ada wisata baru,

kekinian jadi lupa sama budayanya sendiri.” (Wawancara Mukhlisin, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Di sisi lain, masyarakat yang mendukung (pro) dengan kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata juga memiliki kekhawatiran yang serupa, namun masyarakat pro menilai bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah Desa Seloprojo karena arah kebijakan pengembangan berbeda dari masa kepemimpinan sebelumnya.

“Mboten masalah sakjane mbak, niku konsekuensi ingkang kudu tinampi kaleh kebijakan sing molah maleh...(Tidak masalah sebenarnya mbak, itu konsekuensi yang harus diterima dari kebijakan yang berubah-ubah ini...)” (Wawancara Siti Rahayu, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Kepala desa periode sebelumnya –Bapak Sukamdi, juga menyayangkan jika kebudayaan dan kesenian hilang begitu saja, apalagi pada masa kepemimpinannya, kesenian Desa Seloprojo seperti kesenian Njanen dan tari Jatilan diadakan pelatihan secara rutin dan dipentaskan di acara tradisi Merti Desa.

“Saya senang dengan pengembangan desa wisata, tapi kok kebudayaannya jadi berkurang ya padahal kebudayaan desa ini sangat penting untuk tetap dilestarikan.” (Wawancara Sukamdi, Kepala Desa Seloprojo Periode Sebelumnya, 2022)

Menanggapi hal tersebut, menurut Carik Desa Seloprojo menyatakan bahwasannya kesenian Desa Seloprojo dirasa sudah maju dan setiap ada pementasan pasti akan banyak pengunjung yang datang sehingga memang lebih tepat potensi yang ada yang sebelumnya tidak termanfaatkan dengan baik jadi akan dikembangkan serta diharapkan potensi alam air terjun tersebut dapat dikenal dan dikunjungi banyak orang untuk menambah biaya pemasukan desa. Ibu Carik juga meyakini bahwa jika tempat wisatanya sudah siap dan jadi dengan baik dan berkembang secara sempurna kedepannya masyarakat akan senang karena menurutnya masyarakat yang menolak tersebut belum memiliki gambaran. (Wawancara Sekretaris Desa Seloprojo, 2022)

Peneliti beropini bahwa kekhawatiran akan kebudayaan dan kesenian asli Desa Seloprojo yang merupakan warisan para leluhur menjadi tidak tersentuh dan hilang menjadi salah satu faktor masyarakat melakukan tindakan resistensi

terhadap kebijakan pengembangan desa wisata. Kekhawatiran tidak hanya disampaikan oleh masyarakat yang menolak (kontra) terhadap kebijakan namun juga oleh masyarakat yang mendukung (pro) kebijakan, kelompok seni Seloprojo, serta karang taruna Desa Seloprojo. Sekalipun terdapat pemakluman yang disampaikan oleh masyarakat yang pro kebijakan dengan anggapan bahwa pemerintah Desa Seloprojo tidak bisa berfokus dengan dua tujuan pengembangan sebagai desa wisata sekaligus desa budaya. Namun, bagi masyarakat yang kontra kebijakan, hal ini tidak bisa dianggap sebagai suatu pemakluman dan menganggap bahwa kekhawatiran akan hilangnya kebudayaan dan kesenian asli Desa Seloprojo merupakan suatu permasalahan yang serius dan membutuhkan tanggapan serta tindakan nyata dari kepala desa saat ini –Bapak Gunadi.

b) Pembangunan Pariwisata Membutuhkan Dana yang Banyak

Tindakan resistensi masyarakat Desa Seloprojo terkait kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata juga dilatar belakangi oleh penggunaan dana desa dalam pemugaran wisata alam air terjun Sumuran. Masyarakat menilai dengan banyaknya pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata akan memakan banyak dana desa demi menciptakan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai menuju kawasan wisata air terjun Sumuran.

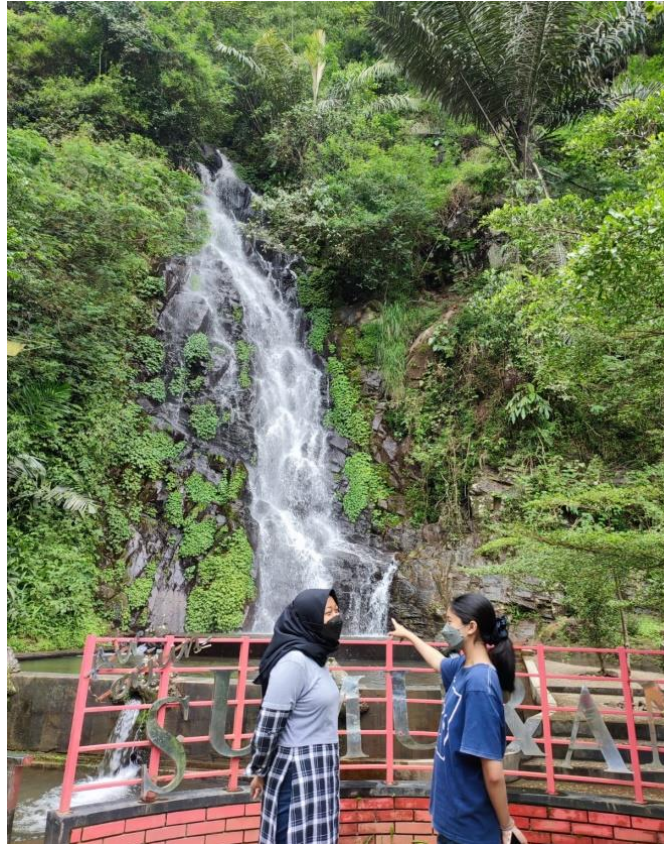
Menurut Agus, sebagai masyarakat yang kontra dengan kebijakan desa wisata menganggap bahwa dalam melakukan pengembangan wisata ini kurang efektif karena dalam pengelolaannya masih belum jelas dan masih kurang dalam mengelola wisata tersebut sehingga dirasa percuma saat musyawarah pun tetap dalam keputusan awal.

“Yang saya soroti itu pengelolaan wisatanya itu loh mbak, gak jelas menurut saya, dan pengelolaannya gimana saya juga ga ngerti selain itu kurang sreg lah intinya...” (Wawancara Agus, Warga Desa Seloprojo, 2022)

Pendapat ini juga diperkuat oleh pengurus pemerintah Desa Seloprojo, Suryadi, dimana dalam proses pembangunan infrastruktur dan dalam pengembangan desa wisata ini telah mengalami pembengkakan dari berbagai

sektor mulai dari target waktu pengerjaan pembangunan kawasan wisata, pelaksanaan forum kebijakan, hingga dana yang dikucurkan pemerintah Desa Seloprojo.

Gambar 5.2 Kawasan Wisata Air Terjun Sumuran, Desa Seloprojo



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Desember 2022

Pendapat sama juga disampaikan oleh kelompok seni Seloprojo yang memandang bahwa sejak pergantian kebijakan desa wisata, acara tradisi yang sering diadakan oleh pemerintah Desa Seloprojo seperti Merti Desa dan tradisi Saparan tidak lagi diagendakan secara rutin dan hanya diadakan beberapa kali saja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, mereka menganggap bahwa pemerintah desa mengalihkan dana tersebut demi pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran yang tengah berlangsung.

“Iya jadi berkurang rutinannya (Merti Desa), mungkin karena dananya dipakai untuk pembangunan wisata baru ya, jadi untuk acara lain disederhanakan dulu dan tidak sesering biasanya. Ya pasti merugikan kita,

jadi jarang tampil dan dulu kita sering tampil dan latihan bersama gawe jaga kebudayaan sing weh di kei leluhur mbiyen ben tetap di lestarikan ke generasi selanjutnya.” (Wawancara Sintia, Kelompok Seni Seloprojo, 2022)

Berdasarkan keterangan tersebut, kelompok seni juga dirugikan secara tidak langsung karena agenda rutin yang biasa dilaksanakan semasa kepemimpinan periode sebelumnya tidak bisa dilakukan lagi. Anggapan tersebut diaminkan oleh kepala Desa Seloprojo –Bapak Gunadi, yang menyampaikan bahwa dana desa yang semula dialirkan ke pengembangan desa budaya kini dialihkan menjadi pengembangan desa wisata melalui pembangunan air terjun Sumuran benar adanya. Bapak Gunadi juga memberikan pembelaan bahwa kegiatan Merti Desa atau pun pelatihan kesenian Njanen dan tari Jatilan tetap diadakan, meskipun dengan intensitas yang tidak sesering sebelumnya.

“Iya betul, dananya kita alihkan ke pembangunan air terjun, sarana prasarananya kan sudah tidak layak kita perbaiki dan kita tambah fasilitas lainnya jadi dipugar biar lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung kesana. Kalo Merti Desa sama Njanen tetap diadakan, tidak akan saya hilangkan kebudayaan asli desa kita, tapi kan arah kebijakannya beda, jadi yaa fokusnya sekarang bukan ke budaya tapi ke wisatanya.” (Wawancara Gunadi, Kepala Desa Seloprojo , 2022)

Pengelontoran dana yang banyak dalam pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran diamini oleh data APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2022 Desa Seloprojo yang terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa (PAD) sebesar 4,91% atau Rp 70.400.000
2. Dana desa sebesar 60,87% atau Rp 873.679.000
3. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 4,53% atau Rp 65.365.292
4. Alokasi dana desa sebesar 29,95% atau Rp 479.356.000
5. Bantuan keuangan kabupaten sebesar 0,42% atau Rp 6.000.000
6. Penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 35,37% atau Rp 505.895.292
7. Pelaksanaan pembangunan desa sebesar 32,03% atau Rp 458.839.000
8. Pembinaan kemasyarakatan sebesar 6,17% atau Rp 88.300.000
9. Pemberdayaan masyarakat sebesar 1,2% atau Rp 17.226.000
10. Penanggulangan bencana sebesar 25,17% atau Rp 360.000.000

Pengembangan desa wisata Seloprojo untuk pembangunan kawasan air terjun Sumuran setidaknya memakan hampir 75% dari total alokasi dana desa. Menurut Kepala Desa Seloprojo – Bapak Gunadi menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut sebanding dengan terbengkalainya air terjun Sumuran pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya sehingga akan memakan banyak sekali biaya dalam pembangunan serta perawatannya (Wawancara Gunadi, Kepala Desa Seloprojo , 2022).

c) Doktrinasi Pengikut Kepala Desa Periode Sebelumnya

Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai macam prinsip yang mereka anut. Prinsip inilah yang seringkali menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Timbulnya pro dan kontra tak lepas dari pengajaran dan doktrinasi dari orang-orang yang dianggap pintar atau orang-orang yang dianggap berpengaruh di desa tersebut. Karena berbedanya prinsip, tujuan, dan ekspektasi dari berbagai kalangan masyarakat itu, membuat masyarakat di Desa Seloprojo saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana salah. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antar masyarakat, karena akan timbul diskriminasi yang pada akhirnya memunculkan kekerasan antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pengembangan desa wisata. Hal ini juga yang membuat kelompok-kelompok masyarakat merasa terancam dalam memegang teguh prinsip mereka pada kebijakan desa budaya karena merasa tidak leluasa apalagi ditambah dengan fakta bahwa suara mereka tidak didengar oleh pemerintah Desa Seloprojo yang bersangkutan. Kelompok-kelompok masyarakat yang kontra beranggapan bahwa keyakinan yang mereka miliki adalah yang paling benar dan yang diyakini kelompok-kelompok pro kebijakan adalah salah dan berlaku sebaliknya.

Tindakan resistensi yang dilakukan masyarakat kontra kebijakan disebabkan oleh doktrin kuat dari pemimpin sebelumnya yang meyakini bahwa kebudayaan dan kesenian merupakan jantung kehidupan Desa Seloprojo sehingga ketika kebijakan desa budaya tidak dilanjutkan dan justru berubah arah pengembangan hal tersebut memicu reaksi ketidaksetujuan masyarakat. Peneliti

melakukan observasi terhadap kepala desa periode sebelumnya, bapak Sukamdi terkait keputusan kebijakan pengembangan desa wisata tersebut, dan menemukan fakta bahwa data tersebut benar adanya. Kepala desa periode sebelumnya menyayangkan jika kebijakan sebelumnya berhenti dan tidak dilanjutkan saja (Wawancara Sukamdi, Kepala Desa Seloprojo Periode Sebelumnya, 2022).

Peneliti juga berpendapat bahwasanya tindakan resistensi yang dilakukan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pengembangan desa wisata Seloprojo secara cepat atau lambat akan menimbulkan konflik berkepanjangan jika tidak diatasi dengan baik oleh kepala desa Seloprojo saat ini. Resistensi tersebut memicu konflik kekuasaan antara kepala desa periode saat ini dengan kepala desa periode sebelumnya sebab keduanya dianggap memiliki kekuatan yang sama dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat yang berseberangan kubu. Kepala desa periode sebelumnya yang tidak mendukung upaya pengembangan desa wisata pada masa kepemimpinan kepala desa periode saat ini justru melakukan doktrinasi seolah-olah masih memiliki legitimasi power yang melekat, padahal realitanya kekuasaan ini telah berpindah tangan menjadi milik kepala desa Seloprojo periode saat ini. Sehingga menurut peneliti, ketika kepala desa saat ini dapat lebih bertindak tegas dengan memunculkan power legitimasinya yaitu menampilkan kekuasaannya sebagai kepala desa Seloprojo maka mungkin saja tindakan resistensi masyarakat tidak akan berkepanjangan karena mampu untuk dikendalikan serta dapat digunakannya sumber daya yang ada dalam organisasi.

d) Sosialisasi yang Kurang Efektif

Untuk memberikan pengetahuan pengembangan desa wisata, pemerintah Desa Seloprojo melakukan program sosialisasi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi lewat media sosial yaitu *WhatsApp (WA) Group*. Grup WA ini dijadikan pemerintah Desa Seloprojo sebagai alat komunikasi mengenai kebijakan pengembangan desa wisata meliputi jadwal forum pertemuan, implementasi kebijakan pembangunan kawasan wisata, juga sebagai wadah keluhan masyarakat ketika ada yang perlu diketahui. Yang menjadi anggota grup WA tersebut adalah kepala desa, perangkat desa, ketua dusun Desa Seloprojo dan

beberapa tokoh masyarakat. Informasi yang disebarkan lewat grup tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat secara umum melalui ketua masing-masing RT (Wawancara Sutikno, Kadus Desa Seloprojo, 2022). Selain itu kegiatan sosialisasi lainnya juga disampaikan melalui kegiatan desa lainnya seperti menyampaikan pengumuman kerja bakti maupun swadaya masyarakat lainnya menggunakan pengeras suara.

Menurut Sutikno sosialisasi melalui kepala dusun telah dilakukan dengan pemberian penjelasan hingga pengertian kepada masyarakat yang melakukan penolakan namun pada nyatanya masih banyak masyarakat yang membicarakannya atau menggunjing di belakang. Namun, menurut Sutikno, dia akan berusaha memberikan pengertian lebih lanjut jika melakukan pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan potensi kedepannya akan menguntungkan desa dan masyarakat desa itu sendiri (Wawancara Sutikno, Kadus Desa Seloprojo, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh James Scott didapati bahwa faktor utama pendorong resistensi masyarakat adalah faktor budaya dan ekonomi karena kepedulian masyarakat Desa Seloprojo serta faktor politik yaitu adanya doktrinasi kepemimpinan periode sebelumnya terhadap kebijakan pengembangan desa wisata yang disusun pemerintah desa.

Berdasarkan pemaparan diatas juga diketahui bahwa alasan dibalik tindakan resistensi masyarakat terkait kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata yaitu penggunaan dana desa untuk pembangunan kawasan wisata memang benar adanya. Hal tersebut dikarenakan oleh kondisi air terjun Sumuran yang pada masa kepemimpinan sebelumnya tidak dirawat dan dijaga dengan baik sehingga ketika pada masa sekarang yang mengalami perubahan orientasi kebijakan menjadi desa wisata menjadikan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas dan sarana prasarana air terjun membengkak sangat banyak agar tercipta wisata alam yang bagus, memadai, dan layak untuk dipromosikan demi menunjang minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata air terjun Sumuran, Desa Seloprojo, Kabupaten Magelang.

B. Tanggapan Pemerintah Desa Seloprojo terhadap Masyarakat yang Melakukan Resistensi

Pemerintah tidak mengelak mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo terkait kebijakan pengembangan desa wisata. Mereka paham betul bahwa perlawanan-perlawanan tersebut terjadi. Namun, menurut peneliti pemerintah Desa Seloprojo belum mengambil tindakan yang berarti dalam menangani perlawanan-perlawanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang beranggapan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seloprojo adalah perlawanan yang rasional. “*Nek rak seneng yo rapopo... pembangunan yo tetep mlaku kok* (Kalo tidak suka yang tidak apa-apa... pembangunan juga tetap berjalan)” ungkap Ibu Carik Desa Seloprojo yang ditemui peneliti, ia menganggap perlawanan tersebut merupakan hal yang wajar sekalipun begitu, menurutnya tindakan masyarakat tersebut masih harus lah memerlukan perhatian yang serius dalam penanganannya. Ia juga menambahkan bahwa yang melakukan pelanggaran hanya sebagian kecil dari keseluruhan masyarakat sehingga itu bukan menjadi sebuah masalah (Wawancara Sekretaris Desa Seloprojo, 2022). Sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti, pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat masif dilakukan terutama dalam hal penolakan partisipasi aktif masyarakat dalam program kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Seloprojo tidak memberikan perhatian lebih terhadap penerapan kebijakan pada masyarakat sedangkan kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan kawasan wisata sesuai dengan RPJM Desa Seloprojo tahun 2019-2024.

Salah satu aspek yang mempengaruhi jalannya kebijakan publik menurut Arina dkk (2020) adalah disposisi atau tabiat dari pelaksanaan kebijakan. Bisa dalam bentuk kejujuran, disiplin, kecerdasan, dan komitmen. Jika pelaksana kebijakan memiliki tabiat yang baik, maka proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya jika pelaksana kebijakan memiliki tabiat yang buruk, maka proses pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam kasus ini disposisi pelaksanaan kebijakan yaitu masyarakat Desa Seloprojo masih tergolong tidak cukup baik karena ketidakdisiplinan mereka dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga berdampak kepada pelaksanaan kebijakan yang belum mencapai kata berhasil.

Suksesnya suatu kebijakan juga bergantung pada pembuat kebijakan dalam praktek pembuatan pengawasan maupun evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Sutikno menyatakan bahwa tindakan resistensi yang dilakukan masyarakat sangat menghambat pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran, Desa Seloprojo (Wawancara Sutikno, Kadus Desa Seloprojo, 2022). Tidak adanya tindakan tegas bagi masyarakat yang tidak mengikuti program kebijakan desa wisata juga menjadikan warga lain merasa bahwa pelanggaran tersebut bukan suatu hal yang serius sehingga presentase mereka akan meniru menjadi lebih tinggi. Kembali lagi, jika disposisi buruk maka pelaksanaan kebijakan tidak akan optimal. Tanggapan pemerintah Desa Seloprojo hanya sebatas tetap melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat Desa Seloprojo yang terbukti terang-terangan kontra dengan kebijakan pengembangan desa wisata.

Misalnya seperti yang dilakukan Bapak Gunadi selaku kepala Desa Seloprojo yang berencana untuk memberikan edukasi pada masyarakat Desa Seloprojo tanpa terkecuali dan membujuk masyarakat agar mau berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata Seloprojo agar dapat memberikan fasilitas terbaik dan melakukan promosi yang baik guna memasarkan pariwisata Desa Seloprojo ke luar daerah.

“Rencana saya nanti akan saya adakan lagi edukasi bujuk warga desa biar mau ikutan gotong royong lagi demi bisa memberikan fasilitas terbaik ke pengunjung terus promosi ke luar Magelang juga.” (Wawancara Gunadi, Kepala Desa Seloprojo, 2022)

Tanggapan kepala Desa Seloprojo mengenai berbagai bentuk tindakan resistensi masyarakat yang kontra dengan kebijakan desa wisata ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam QS. An Nahl: 125 sebagaimana firman Allah SWT:

أَدْخِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ ١٢٥

Artinya:

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW agar mengajak makhluk kepada Allah SWT dengan hukum, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah SWT : “*dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,*” berdialoglah pada mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan. Firman Allah SWT tersebut memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijakan dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin.

Melalui edukasi dan diskusi terkait kebijakan pengembangan Desa Seloprojo sebagai desa wisata diharapkan akan menemukan titik terang seperti harapan yang disampaikan oleh salah satu anggota Karang Taruna Desa Seloprojo yang berharap bahwa pemerintah Desa Seloprojo bisa mengembangkan desa wisata yang berbasis budaya dimana wisata dan budaya dapat berjalan beriringan sehingga Desa Seloprojo dapat dikenal oleh khalayak luas bukan hanya wisata alamnya namun juga budayanya agar kebudayaan dan kesenian asli Desa Seloprojo tidak hilang dan akan selalu dilestarikan oleh pewarisnya yaitu anak-anak maupun warga Desa Seloprojo lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Resistensi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Seloprojo terkait kebijakan pengembangan desa wisata menjadikan warga Desa Seloprojo terbagi menjadi dua kubu yang berseberangan. Menurut James Scott, resistensi dilakukan untuk mempertahankan subsistensi masyarakat guna melakukan penolakan perubahan dengan ketetapan yang ada melalui banyaknya gerakan perlawanan.

Dalam penelitian ini, tindakan resistensi yang dilakukan masyarakat yang kontra dengan kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan kesenian yang sejatinya telah melekat pada diri masyarakat Desa Seloprojo, selain itu kekhawatiran adanya ketimpangan pembangunan di Desa Seloprojo juga menambah alasan masyarakat untuk menolak kebijakan pengembangan pada masa kepemimpinan saat ini dan justru membandingkannya dengan kebijakan pengembangan desa budaya pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Tindakan resistensi masyarakat yang kontra dengan kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata dilakukan dalam bentuk perlawanan tertutup yaitu dengan membicarakan kejelekan kepala Desa Seloprojo saat ini dan membandingkannya dengan kepala desa periode sebelumnya, tidak menghadiri pertemuan resmi yang diselenggarakan pemerintah desa, serta bersikap acuh tak acuh baik pada kepala Desa Seloprojo maupun pada proses pembangunan kawasan wisata air terjun Sumuran. Masyarakat juga melakukan resistensi dalam bentuk resistensi semi terbuka yaitu dengan melakukan protes secara langsung baik dengan kepala desa maupun petugas pemerintah desa.

Kondisi pariwisata sebelum dan sesudah adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan resistensi masyarakat berbanding terbalik, dimana sebelum adanya perubahan kebijakan, wisata alam air terjun Sumuran tidak terawat dengan baik dan dibiarkan apa adanya sekalipun telah ada wisatawan yang berkunjung ke sana. Sedangkan setelah adanya perubahan kebijakan diiringi dengan resistensi masyarakat, kondisi pariwisata Desa Seloprojo menunjukkan gejala bangkit dengan pembangunan yang telah mencapai 55% dari target pembangunan yang ditetapkan pemerintah Desa Seloprojo.

B. Saran

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa resistensi yang dilakukan masyarakat yang kontra dengan kebijakan desa wisata cenderung akan stagnan dan melemah karena dilihat dari bentuk perlawanan yang mayoritas berupa perlawanan insidental (resistensi tertutup). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi munculnya resistensi masyarakat dalam kasus pergantian arah kebijakan pengembangan Desa Seloprojo menjadi desa wisata, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya bukti konkrit (nyata) dari pemerintah Desa Seloprojo terhadap masyarakat terkait pembangunan wisata alam air terjun akan memberikan keuntungan bagi warga desa sekaligus membuktikan bahwa pembangunan tersebut tidak akan berakhir sia-sia
2. Perlu adanya perbaikan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah Desa Seloprojo agar terjadinya simbiosis mutualisme ke depannya.
3. Perlunya mendudukkan penengah antara masyarakat dengan pemerintah Desa Seloprojo seperti Karang Taruna Desa Seloprojo dalam suatu forum diskusi untuk menjelaskan bagaimana duduk persoalan mengenai arah kebijakan maupun fokus kebijakan secara adil dan netral.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. (2017). Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja Di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu . *Jurnal Studi Sosial Universitas Airlangga*.
- Devi Febrianti, A. S. (2019). Analisis Dampak Wisata Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 3*.
- Djadjuli, E. S. (2020, Agustus). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 7, No 2*.
- dkk, K. J. (2019). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*.
- dkk, K. J. (2019). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*.
- dkk, K. J. (2019). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir . *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*.
- dkk., K. J. (n.d.).
- Fansuri, R. A. (2020). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Objek Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Di Wisata Alam Otak Aik Tojang Dusun Gelogor Desa Lendang Nangka) . *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*.
- Gunadi. (2022, Desember). Wawancara kepala Desa Seloprojo saat ini.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hasnawati. (2020). Kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Malino Kabupaten Gowa. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar*.

- Indrata, A. D. (2021). Seloprojo; Seni Dan Budaya di Kaki Gunung Telomoyo. *Jurnal unimma*, 2-4.
- Komang Jaka Ferdian, I. A. (2019). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *JIPAGS*.
- Komang Jaka, I. S. (2019). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *JIPAGS*.
- Komorina, S. R. (2017). Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Anyar Surabaya Tentang Rencana Pembangunan Apartemen Dan Mal. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- Kusuma, R. I. (2014). Resistensi Elit Lokal dan Masyarakat Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah (Studi Di Desa Sidomulyo, Kecamatan godean, Kabupaten Sleman). *Skripsi Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta*.
- Magrifah T. Idris, d. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Respon Publik LPPM Unisma*.
- Miles, M. B. (1992). *Alnallisis Daltal Kuallitaltif*. Jakarta: Penerbit Universitals Indonesia.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi PenelitiaIn Kuallitaltif*. Bandung: PT Remaljal Rosdalkalryal.
- Ndraha, T. (1981). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Nugraha, O. S. (2018, Mei). Peran Lembaga Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol. 02 No. 01*.
- Nurchayono, O. H. (2017). Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan. *Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi, 1 No 01*.
- Nurfadilah. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makasar*.

- Nurhajati, N. (2018). Dampak Pembangunan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- Pamungkas, K. P. (2016). Resistensi Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah Studi di Desa Wisata Sembungan, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Qodir, M. Y. (2014, Juni). Resistensi Atas Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Pada Masyarakat Orang Rimba di Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1*.
- Raharjo, E. (2018). Optimalisasi penyusunan dan penggunaan APBDES dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten magelang. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- (n.d.). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mgelang Tahun 2019-2024*.
- Rizza Arge Winanta, S. H. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang). *Jurnal Untidar, 6*.
- (n.d.). *RPJMD Kabupaten Mgelang Tahun 2019-2024*.
- RPJMDes Desa Selorpojo Tahun 2019-2025*. (n.d.).
- Salebalni, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarita Anggun Kinanti, I. W. (2019). Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan RISHA di Desa Bayan, Lombok, NTB. *Jurnal Universitas Udayana* .
- Satriani, J. d. (2018). Resistensi Sosial Masyarakat Suku Bajo (Studi Kasus Atas Perlawanan Masyarakat Di Pulau Masudu Kecamatan Poleang Tenggara Terhadap Kebijakan Resettlement Ke Desa Liano Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana). *Neo Societa, Vol. 3; No. 2, 408-415*.
- Scott, J. C. (1988). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: PT Dharma Aksara Pratama.
- Scott, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirman, A. F. (2016). Pengembangan Wisata Desa Di Lingkungan Desa Seloprojo, Ngablak, Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1*.
- Vinithagen, o. M. (2018). Constructive Resistance. *Journal of Political Power* .
- Walhyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologis Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Maldura: UTM PRESS.
- (2022, Desember 8). Wawancara Agus, Warga Desa Seloprojo.
- (2022, Oktober 12). Wawancara Gunadi, Kepala Desa Seloprojo .
- (2022, Oktober 13). Wawancara Hendra, Karang Taruna Desa Seloprojo .
- (2022, Desember 8). Wawancara Kasiah, Kelompok Seni Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Mukhlisin, Warga Desa Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Muslimin, Warga Desa Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Rahman, Kelompok Seni Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Sekretaris Desa Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Sintia, Kelompok Seni Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Siti Rahayu, Warga Desa Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Sri, Warga Desa Seloprojo.
- (2022, Oktober 13). Wawancara Sukamdi, Kepala Desa Seloprojo Periode Sebelumnya.
- (2022, Desember 8). Wawancara Suryadi, Warga Desa Seloprojo.
- (2022, Desember 8). Wawancara Sutikno, Kadus Desa Seloprojo.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kawasan Wisata Air Terjun Sumuran, Desa Seloprojo



Lampiran 2 Foto Kegiatan Observasi bersama Anggota Karang Taruna Desa Seloprojo



Lampiran 3 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Kepala Desa Seloprojo



Lampiran 4 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Masyarakat Desa Seloprojo



Lampiran 5 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Pengelola Kawasan Wisata Air Terjun Sumuran



Lampiran 6 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Masyarakat Kebijakan



Lampiran 7 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Sekretaris Desa Seloprojo



Lampiran 8 Foto Kegiatan Wawancara Bersama Salah Satu Warga Desa Seloprojo



Biografi Penulis



A. Identitas Diri

1. Nama : Annisa Nindiananta
2. NIM : 1806016061
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 4 Februari 2000
4. Alamat : Jln. Kebon Permai III/no. 5
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Email : annisanindiananta@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Batusari 7
2. SMPN 3 Mranggen
3. SMAN 2 Mranggen

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis,

Annisa Nindiananta

NIM. 1806016061